

**PERJUANGAN POLITIK KAUM MISKIN KOTA STUDI KAJIAN SOSIAL
POLITIK KEMASYARAKATAN KOTA MAKASSAR**



SKIRIPSI

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat untuk Menyelesaikan Program
Sarjana (S1) pada Program Sarjana Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Muhammadiyah Makassar*

Oleh

**ALIM AMRI SAID
105380208311**

**JURUSAN PENDIDIKAN SOSIOLOGI
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2018**

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi atas nama **Alim Amri Said**, NIM 105380208311 diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor: 049 Tahun 1439 H/ 2018 M, Sebagai salah satu syarat guna memperoleh Gelar **Sarjana Pendidikan** pada Prodi Pendidikan Sosiologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar, Yudisium pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018.

17 Ramadhan 1439 H
Makassar, -----
02 Juni 2018 M

PANITIA UJIAN

Pengawas Umum : Dr. H. Abd. Rahman Rahim, SE., MM ()
Ketua : Erwin Akib, S.Pd., M.Pd., Ph.D. ()
Sekretaris : Dr. Baharullah, M.Pd. ()
Penguji :
1. Dra. Hidayah Quraisy, M.Pd. ()
2. Risfaisal, S.Pd., M.Pd. ()
3. Dra. Hj. St. Fatimah Tola, M.Si. ()
4. Sam'un Mukramin, S.Pd., M.Pd. ()

Mengetahui

Dekan FKIP
Universitas Muhammadiyah Makassar



Erwin Akib, S.Pd., M.Pd., Ph.D.
NBM: 860 934

Ketua Program Studi
Pendidikan Sosiologi



Drs. H. Nurdin, M.Pd.
NBM: 575 474

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Perjuangan Politik Kaum Miskin Kota (Studi Kasus Kajian
Sosiologi Politik dan Kemasyarakatan Kota Makassar).

Nama : Alim Amri Said

NIM : 105380208311

Prodi : Pendidikan Sosiologi

Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Setelah diteliti dan diperiksa ulang skripsi ini telah memenuhi syarat untuk
dipertanggung jawabkan di depan tim penguji skripsi Fakultas Keguruan dan Ilmu
Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 02 Juni 2018

Disetujui oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II


Prof. Dr. H. Erwan Akib, M.Pd.

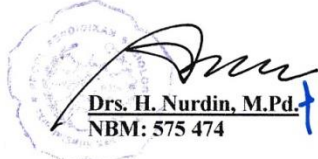

Sam'in Mukhammadin, S.Pd., M.Pd.

Mengetahui

Dekan FKIP
Universitas Muhammadiyah Makassar


Erwin Akib, S.Pd., M.Pd., Ph.D.
NBM: 860 934

Ketua Program Studi
Pendidikan Sosiologi


Drs. H. Nurdin, M.Pd.
NBM: 575 474



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Alamat: Jl. Sultan alauddin No. 259, Telp.makassar. Fax (0411)-860 132 Makassar 90221

KARTU KONTROL BIMBINGAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bersangkutan :

Nama : **Alim Amri Said**
NIM : 105380208311
Pembimbing I: Prof. Dr. Irwan Akib, M.Pd
Jurusan : Pendidikan Sosiologi
Dengan Judul : Perjuangan Politik Kaum Miskin Kota (Studi Kajian Sosial Politik
Kemasyarakatan Kota Makassar

Konsultan Pembimbing I

No	Hari/ Tanggal	Uraian perbaikan	Paraf Pembimbing
		- perbaiki ; banyak kata yg tidak ada di dlm part	
		- cek kembali daftar pustaka	
		ok	

Catatan

Mahasiswa dapat mengikuti Skripsi jika telah melakukan pembimbingan minimal 3 (tiga) kali dan proposal telah disetujui kedua pembimbing.

Mengetahui,
Ketua Jurusan Pendidikan Sosiologi

Dr. H. Nursalam, M. Si.
NBM: 951 829

16-11-2017
all



KARTU KONTROL BIMBINGAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bersangkutan :

Nama : Alim Amri Said
 NIM : 105380208311
 Pembimbing II: Sam'un Mukramin S.Pd, M.Pd
 Jurusan : Pendidikan Sosiologi
 Dengan Judul : Perjuangan Politik Kaum Miskin Kota (Studi Kajian Sosial Politik Kemasyarakatan Kota Makassar

Konsultasi Pembimbing I

No	Hari/Tanggal	Uraian perbaikan	Paraf Pembimbing
1.	Sabtu, 16/12/2017	Buat Abstrak : - Jenis Penelitian - Tujuan Penelitian - Hasil Penelitian - Mumpaka teori Ilmu Khaldun Hz - Masyarakat: Budaya Arab - Hadis/Mak - Asbabulmuja - Mumpaka masyarakat - Asbabulmuja - Asbabulmuja	
2.	Jumat, 23/12/17	- Kakorinsos Makassar - Asbabulmuja	
3.	Kamis, 05/01/18	- Asbabulmuja	

Catatan
 Mahasiswa dapat mengikuti Skripsi jika telah melakukan pembimbingan minimal 3 (tiga) kali dan proposal telah disetujui kedua pembimbing.

Mengetahui,
 Ketua Jurusan Pendidikan Sosiologi

Dr. H. Nursalam, M. Si.
 NBM: 951 829



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Alim Amri Said

Nim : 10530208311

Jurusan : Pendidikan Sosiologi

Judul skripsi : PERJUANGAN POLITIK KAUM MISKIN KOTA

(Studi kajian sosial politik kemasyarakatan kota Makassar)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya ajukan di depan tim penguji adalah hasil karya saya sendiri dan bukan hasil ciptaan orang lain atau dibuatkan oleh siapapun.

Demikian pernyataan ini saya buat dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 20 januari 2018

Yang Membuat Pernyataan

ALIM AMRISAID



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

SURAT PERJANJIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Alim Amri Said

Nim : 10530208311

Program Studi : Pendidikan Sosiologi

Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Dengan ini menyatakan perjanjian sebagai berikut :

1. Mulai dari penyusunan proposal sampai selesai penyusunan skripsi ini, saya akan menyusun sendiri skripsi saya (tidak dibuatkan oleh siapapun).
2. Dalam penyusunan skripsi, saya akan selalu melakukan konsultasi dengan pembimbing yang telah ditetapkan oleh pimpinan fakultas.
3. Saya tidak akan melakukan penjiplakan (plagiat) dalam penyusunan skripsi.
4. Apabila saya melanggar perjanjian seperti pada butir 1, 2, dan 3, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Makassar, 20 januari 2018

Yang Membuat Pernyataan

Alim Amri Said

Mengetahui
Ketua Program Studi
Pendidikan Sosiologi

Drs. H. Nurdin, M.Pd
NBM : 575 474

Motto dan persembahan

Sejarah dari semua masyarakat hingga hari ini adalah sejarah pertentangan kelas, orang-orang merdeka dan budak, tuan dan hamba, proletariat dan borjuasi peneknya penindas dengan yang tertindas.

(manifesto perjuangan kelas)

Jika ada sebuah Negara, maka akan ada dominasi, dan pada gilirannya akan ada perbudakan

(mikhail Bakunin)

Semua orang bisa memegang kunci perubahan sosial jika dia berani secara teori dan tindakan membuka pintu kebohongan yang diciptakan oleh kapitalisme dan Negara

(penulis)

Dipersembahkan untuk

Kedua orang tuaku

Para pejuang kemanusiaan dan lingkungan

Buat kawan-kawan yang tetap berjuang melawan penindasan

ABSTRAK

ALIM AMRI SAID,2018“PERJUANGAN POLITIK KAUM MISKIN KOTA STUDI KAJIAN SOSIAL POLITIK KEMASYARAKATAN KOTA MAKASSAR” DIBIMBING OLEH IRWAN AKIB DAN SAM’UN MUKRAMIN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah metode penelitian kualitatif. Fokus penelitian ditekankan pada perjuangan politik kaum miskin kota sebagai studi kajian sosial politik dan kemasyarakatan kota Makassar. Data penelitian dikumpulkan melalui wawancara terhadap 20 orang yang terdiri dari warga miskin kota, Dinas Penataan Ruang Kota Makassar, perwakilan dari Lembaga Bantuan Hukum Kota Makassar selaku pengacara dan Advokat warga, pengurus dari FORWA. Penentuan informan berdasarkan *teknik purposive sampling* dan dilakukan observasi untuk proses keabsahan data.

Tujuan penelitian untuk mengetahui kondisi kaum miskin kota di Makassar dan upaya politik kaum miskin kota memperjuangkan haknya atas ruang kota, dimana kota selain daerah yang padat penduduk kota juga menjadi wilayah yang sarat akan sebuah pembangunan, dimana ruang yang terbatas itu yang syarat pula untuk diperebutkan oleh para investor dan kaum miskin kota seperti di Bulogading dan Kampung Berua

Hasil penelitian yang di peroleh berupa upaya kaum miskin kota memperjuangkan hak mereka atas kota, adanya upaya solidaritas terhadap kaum miskin kota yang menggalang nasib yang sama, tidak harmonisnya kaum miskin kota dengan Pemerintah Kota karena Pemerintah melihat keuntungan dari pembangunan ketimbang warganya yang masih berada digaris ekonomi di bawah rata-rata dan adanya upaya dan harapan kaum miskin kota untuk mengubah kehidupannya lewat organisasi rakyat.

Kata Kunci : Perjuangan politik, kaum miskin kota, FORWA (Forum Warga)

Daftar Bacaan : 18 (2000-2017)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah adalah kata yang pantas namun tidak akan pernah cukup untuk penulis tasbihkan sebagai ungkapan rasa syukur atas selesainya proposal ini. Proposal yang berjudul “Perjuangan Politik Kaum Miskin Kota Studi (Kajian Sosial Politik Kemasyarakatan Kota Makassar)” tidak lepas dari kekurangan dan keterbatasan. Meski begitu, dukungan dari berbagai pihak telah membuat skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Sebagai ungkapan terima kasih, penulis mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT, sang maha di atas segala maha. Salawat dan salam teriring untuk Baginda Muhammad SAW, Rasul terakhir, sang penyempurna. Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Prof. Dr. Irwan Akib, M. Pd selaku pembimbing I dan Bapak Sam’un Mukramin, S.PD, M.Pd selaku pembimbing II.

Rentetan ucapan terima kasih ini kemudian penulis akhiri dengan ucapan mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kesalahan dan ketidaksempurnaan dari skripsi ini. Kritik dan saran dari pembaca akan penulis terima dengan senang hati. Wassalam.

Makassar, 25 Juni 2017

ALIM AMRI SAID

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
RINGKASAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
II. TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Pengertian Perjuangan Politik	7
1. Pengertian Perjuangan.....	7
2. Pengertian Politik.....	7
3. Pengertian Perjuangan Politik.....	10
B. Pengertian Kemiskinan Kota.....	12
1. Pengertian Kemiskinan.....	12
2. Pengertian Kota.....	13
C. Upayah Kaum Miskin Kota.....	15
1. Perjuangan Politik.....	15
2. Konflik	20

3. Perlawanan.....	24
4. Peranan Pemerintah.....	30
D. Kerangka Pikir	31
III. METODE PENELITIAN.....	32
A. Jenis Penelitian.....	32
B. Lokasi Penelitian.....	33
C. Informasi Penelitian.....	33
D. Fokus Penelitian	35
E. Instrumen Penelitian.....	35
F. Jenis dan Sumber Data Penelitian	36
G. Teknik Pengumpulan Data	37
H. Teknik Analisis Data	38
I. Teknik Keabsahan Data.....	39
J. Jadwal Penelitian.....	41
VI. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	44
A. Deskripsi obyek penelitian.....	44
1. Profil Administrasi Wilayah Kota Makassar.....	44
2. Profil Sosial Ekonomis Kota Makassar.....	47
3. Kampung Berua	48
4. Bulogading	50
B. Perjuangan politik miskin kota Makassar.....	52
1. <i>Civil Society</i>	54
2. Program Kerja	54

C. Penggorganisasian dan Pengorganisirannya Rakyat	56
D. Capaian dan faktor pembatas.....	59
V. PENUTUP.....	60
A. Kesimpulan.....	41
B. Saran	41
C. Capaian dan Faktor Pembatas	41

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemiskinan di kota menjadi sebuah permasalahan dari dulu hingga sekarang, selain permasalahan lainnya seperti pemukiman kumuh, pengganguran, kebersihan hingga kebutuhan pangan. Namun dalam melihat permasalahan tersebut, Pemerintah Kota menawarkan solusi yang justru memperdalam kemiskinan warga kota. Setiap pembangunan kota kebanyakan mempunyai kecenderungan menutup ruang bagi kaum miskin kota. Hal ini terjadi karena warga miskin selalu dipandang oleh pemerintah kota sebagai masalah dan aib bagi pembangunan kota itu sendiri.

Cara pandang ini muncul karena perkembangan persaingan setiap kota di Indonesia yang selalu didorong menuju pembangunan bertaraf kota dunia. Tapi yang menjadi persoalan bukan pembangunan yang dicita-citakan melainkan kondisi sosial dan kesiapan warga yang kebanyakan dari mereka masih jauh dari standar sosial kota dunia. Misalnya saja persoalan pemukiman kumuh, pengganguran dan pedagang kaki lima (PK5) liar yang berserakan di jalanan masih jauh di atas rata rata penduduk kota.

Berdasarkan ulasan dari proyek MEA (Masyarakat Ekonomi Asean) dan MP3EI (Master Plan Perluasan, Percepatan dan Pembangunan Ekonomi Indonesia) yang telah disepakati oleh beberapa negara ASEAN yang menyaratkan persaingan

secara ekonomi di wilayah pembangunan infrastruktur yang jika dibenturkan dengan kondisi Indonesia maka bukan hal mustahil lagi sengketa antara pemerintah dan rakyatnya akan terjadi sebagaimana yang terjadi di setiap kota di Indonesia. Hal tersebut dimungkinkan oleh watak sistem sosial yang dibangun pemerintah dan negara adalah sistem kapitalisme yang aspek pembangunannya hanya dirasakan oleh masyarakat golongan atas dan menengah, sementara masyarakat golongan bawah seperti orang miskin menjadi korban oleh sistem ini. Manipulasi atas nama pembangunan pun dilakukan demi melancarkan program dan proyek ini seperti yang setiap harinya mengisi ruang publik di media-media, baik media elektronik maupun media cetak dengan alasan kenyamanan, kebersihan dan keindahan kota. Logika kelayakan bagi kelas menengah dan atas pun dipaksa mengiyakan program ini bagi kaum miskin kota.

Persoalan ini juga berlangsung di Kota Makassar. Proyeksi Kota Makassar dengan visi dan misi menuju kota dunia, berhubungan erat dan mempengaruhi kondisi sosial masyarakatnya yang masih di bawah standar kota dunia. Hal ini menjadi ciri mendasar dari kota ini. Beban besar bertambah lagi jika proyek pembangunan dan visi misi kota ini tetap dipaksakan. Penggusuran dan perampasan lahan serta segala hal untuk menyingkirkan kaum miskin kota akan tetap dilakukan. Hal tersebut tervisualisasi dengan jelas di beberapa titik Kota Makassar seperti Bulogading dan Kampung Berua yang mengalami penggusuran yang direncanakan oleh pihak pemerintah untuk mempercantik kota dengan membangun hotel, perumahan elit dan *mall*, yang hanya akan dinikmati oleh segelintir orang saja. Tapi perjuangan kaum miskin kota yang ada di Bulogading

dan Kampung Berua masih bergejolak dan menginspirasi secara politik tempat-tempat lain di kota Makassar. Tempat tersebut memiliki kondisi yang sama demi upaya mempertahankan hidupnya dari arus pembangunan kota yang tidak manusiawi.

Wilayah Kota Makassar merupakan sentral kota besar di Indonesia bagian Timur dan menjadi daerah strategis secara basis pembangunan ekonomi bagian Timur Indonesia. Kota *Anjing Mammiri*' ini juga merupakan wilayah strategis yang menghubungkan Indonesia bagian Timur dengan pusat kota negara di Jakarta. Hal inilah yang mendorong arus pembangunan kota menjadi kian deras, walau kenyataannya masyarakat kota ini tidak siap. Namun hal tersebut tetap dilakukan oleh pemerintah dengan alasan pembangunan ekonomi yang hanya dinikmati oleh segelintir orang dan masyarakat miskin yang menjadi korban secara ekonomi politik dari arus pembangunan kota.

Walau kerap kali Pemerintah Kota Makassar melakukan pemaksaan menggunakan aparatus Negara yang seharusnya melindungi rakyat seperti polisi dan tentara hingga preman bayaran, namun kaum miskin kota tetap melakukan perjuangan. Serangkaian upaya yang dilakukan pemerintah dan pengusaha seperti kriminalisasi, teror dan pelanggaran hak lainnya terus mereka lakukan, tapi kaum miskin Kota Makassar tetap melakukan perjuangan secara politik di Kota Makassar sebagai upaya mempertahankan haknya di perkotaan.

Perjuangan politik bagi kaum miskin Kota Makassar menjadi alternatif perjuangan untuk terus melangsungkan hidupnya. Upaya yang kerap kali dilakukan secara politik tersebut seperti membangun organisasi rakyat,

demonstrasi, kampanye isu sampai pendudukan instansi pemerintahan, seperti Pengadilan dan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Ulasan mengenai perjuangan kaum miskin kota di Makassar seperti di Bulogading dan Kampung Berua menjadi sebuah rangkaian perjuangan dan perlawanan terhadap tindakan sewenang-wenang pemerintah yang ingin menyingkirkan rakyatnya demi pembangunan kota dan demi kepentingan pengusaha.

Kondisi Kota Makassar yang begitu strategis secara ekonomi mendorong upaya para investor menanamkan modalnya. Dari sinilah pembangunan menjadi kunci utama yang berimplikasi pada penyingkiran kaum miskin kota. Tapi pemerintah tetap memaksakan proyek tersebut sehingga benturan berupa penggusuran dan perampasan lahan memunculkan perjuangan politik kaum miskin kota.

Hal inilah yang memicu munculnya beberapa rangkaian kemungkinan dan alternatif perjuangan politik kaum miskin kota di Kota Makassar yang merupakan upaya untuk mempertahankan hidupnya secara politik dan melangsungkan kehidupannya selaku warga negara yang berhak mendapatkan hak-hak yang layak. Solidaritas-solidaritas di lingkaran miskin kota untuk memperbaiki hidupnya pun lahir, seperti yang terjadi di Bulogading dan Kampung Berua Kota Makassar pun dilakukan. Upaya-upaya tersebut meliputi bagaimana mengomunikasikan isu, kampanye dan demonstrasi demi perjuangan melawan intimidasi, perampasan dan kekerasan seperti penggusuran dan perampasan lahan.

Dari penjelasan singkat ini, maka peneliti tertarik untuk melihat lebih dalam proses politik masyarakat miskin kota di Makassar, khususnya warga Jalan Bulogading dan Kampung Berua, dalam menghadapi ekspansi pembangunan kota di Makassar. Untuk itu peneliti mengangkat judul penelitian “Perjuangan Politik Kaum Miskin Kota (Studi Kasus: Kajian Sosiologi Politik dan Masyarakat Kota Makassar)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan masalah yang diangkat dalam penelitian ini sebagai berikut.

1. Bagaimana perjuangan politik kaum miskin kota di Makassar?
2. Bagaimana capaian politik kaum miskin kota di Makassar?
3. Apa saja faktor penghalang perjuangan politik kaum miskin kota di Makassar?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui bentuk perjuangan politik kaum miskin di Bulogading dan Kampung Berua, Makassar.
2. Untuk mengetahui capaian dari perjuangan politik kaum miskin kota di Bulogading dan Kampung Berua, Makassar.
3. Untuk mengetahui faktor penghalang dari perjuangan politik kaum miskin kota di Bulogading dan Kampung Berua, Makassar.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui tujuan dari perjuangan politik kaum miskin kota di Bulogading dan Kampung Berua Makassar.
2. Untuk mengetahui sejauh mana perjuangan politik kaum miskin kota di Bulogading dan Kampung Berua Makassar.
3. Untuk mengetahui faktor penghambat dan faktor pendukung perjuangan politik kaum miskin kota di Bulogading dan Kampung Berua Makassar.

Kegunaan Teoritik:

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan ilmu pengetahuan, khususnya pendidikan sosiologi dan sebagai bahan masukan bagi penelitian-penelitian yang akan datang mengenai perjuangan politik kaum miskin kota di Bulogading dan Kampung Berua sebagai kajian sosiologi politik dan masyarakat di Kota Makassar.

Kegunaan Praktis:

Hasil penelitian diharapkan dapat berguna sebagai sumber sumbangan pemikiran serta informasi bagi semua kalangan baik dari pemerintah, rakyat Indonesia maupun kita semua.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Perjuangan Politik

1. Pengertian Perjuangan

Susanto Tirtoprojo (Susanto.2007:7) menyatakan bahwa perjuangan merupakan suatu usaha untuk meraih suatu yang diharapkan demi kemuliaan dan kebaikan. Pada masa penjajahan, perjuangan adalah suatu usaha yang dilakukan dengan pengorbanan, peperangan dan diplomasi untuk memperoleh atau mencapai kemerdekaan, perjuangan juga punya arti luas sehingga apa yang dilaksanakan oleh pahlawan-pahlawan di Nusantara yang merupakan peristiwa-peristiwa perjuangan nasional Indonesia.

Sementara itu Kansil dan Julianto (Kansil dan Julianto.2002:15) membedakan perjuangan dan pergerakan. Pergerakan mempunyai arti yang khas yaitu perjuangan mencapai masih menggunakan cara-cara tradisional dan belum ada organisasi yang teratur dalam melakukan pergerakan.

2. Pengertian Politik

Politik secara *etimologi* berasal dari bahasa Yunani, yang diartikan sebagai negara kota atau *polis* dalam bahasa Yunani. Dalam *polis* Athena demokrasi mencapai tingkat penerapannya yang luar biasa selama berabad-abad di Eropa, antara abad kedelapan dan kesembilan sebelum masehi, karena politik tidak bisa lepas dari sejarah perkembangan manusia.

Aristoteles (Janet.2016) mengidentifikasi manusia sebagai makhluk politik, dimana posisi masyarakat sebagai komunitas politik dipandang ada secara alamiah. Maka Aristoteles melihat hubungan manusia dalam kelompok atau masyarakat sebagai ciptaan dari alam dan manusia dipandang sebagai binatang yang berpolitik.

Dalam arti luas, Aristoteles melihat politik atau *politeia* sebagai kota atau polis dimana manusia hidup bersama menciptakan sebuah tatanan yang teratur melalui keberadaan kota atau *polis* sebagaimana yang terjadi di Yunani dan Aristoteles melihat posisi manusia dalam komunitas itu kodrat yang harus diterima karena manusia terbentuk oleh komunitasnya maka manusia haruslah berpolitik.

Karl Marx (Erich.2014:9) memandang politik sebagai alat yang digunakan sebuah kelas untuk memenangkan kepentingan kelasnya. Marx sendiri mengklarifikasikan masyarakat dalam dua kelas yang mempunyai kepentingan berbeda dan bertolak belakang dalam sejarah perkembangan masyarakat yang membentuk sebuah tatanan masyarakat kekinian yang membagi dua kelas dalam masyarakat yaitu proletariat dan borjuasi.

Antonio Gramsci (Baiq.2012:34) mengakomodasikan semua kepentingan kelompok-kelompok dari masyarakat dalam sebuah aktivitas yang mempunyai sinegritas. Gramsci melihat politik bukan hanya sebagai alat merebut kekuasaan, tapi melebihi dari itu politik adalah bagaimana mendorong warga terlibat dalam pengambilan keputusan.. .

Murray Bookchin (Janet.2016: 24) pertama-tama memisahkan politik dengan pemerintah atau Negara karena menurutnya sebelum kemunculan negara-negara bangsa berabad lalu, politik dipahami sebagai aktifitas warga dalam sebuah badan publik yang diberdayakan dan dilaksanakan bersama melalui institusi-institusi dan para profesional sehingga membuat masyarakat pasif dalam politik dan kenegaraan yang mengandaikan warga sebagai entitas amatir yang tak mampu mengurus masalah politik. Secara sederhana, Bookchin memberi contoh *historis* seperti politik yang telah dikembangkan oleh masyarakat athena kuno pada pertengahan abad ke lima sebelum masehi, demokrasi *face to face* (bertatap muka) dalam *polis Athena* merupakan tradisi yang dibangun di atas semangat partisipatif dalam komunitas. Praktek demokrasi langsung ini memberikan keleluasan kepada masyarakat *Athena* untuk memikirkan dan menyelesaikan sendiri masalahnya secara mandiri, rapat-rapat warga diadakan setiap minggunya untuk menyelesaikan masalah yang ada dan semua dewasa diwajibkan terlibat dalam majelis warga dan rapat-rapat warga, institusi berupa majelis warga memungkinkan politik menjadi luas dan berlangsung terus menerus.

Perbedaan antara politik dan ke-Negara-an sangatlah penting. Secara sederhana, politik dapat diartikan sebagai usaha untuk menyelesaikan masalah sendiri secara mandiri melalui institusi-institusi partisipatif yang dibangun sendiri oleh warga berdasar kebutuhannya. Sedangkan ke-Negara-an adalah adanya kekuasaan atas segelintir elit terhadap massa. Massa yang kita sebut sebagai rakyat ini, entitas yang telah terspesifikasi oleh negara

hanya dibuat sibuk untuk mengurus urusan pribadinya, menjadi acuh dengan kondisi sosial dengan menyerahkan kepengurusannya kepada negara.

Besar dan meluasnya hegemoni negara ini, makna dasar politik memang menjadi kian kabur menjadikan warga sebatas objek politik, bukannya subjek politik yang dinamis. Kepasifan warga dalam politik membuatnya tercabut dari komunitas, tidak memiliki kekuatan dan sendirian dalam masyarakat massa yang kurang bermanfaat baginya sebagai makhluk politik, menurut Bookchin. Hal demikian semakin menjauhkan warga dalam ranah politik, enggan terlibat aktivitas yang menentukan kelangsungan hidupnya sendiri dan komunitas masyarakat lebih luas. Inilah keberhasilan negara menjauhkan warga dari politik. Semakin warga menjauh dari politik, Negara akan semakin mudah menentukan hidup rakyatnya.

3. Pengertian Perjuangan Politik

Perjuangan politik merupakan sebuah upaya perubahan sosial dengan menggunakan gerakan sosial politik, berupa gerakan terorganisir yang dilakukan massa untuk mencapai sebuah tujuan.

Menurut Antonio Giddens (Baiq.2010:4) menyatakan gerakan sosial sebagai upaya kolektif untuk mengejar kepentingan bersama atau gerakan yang mencapai tujuan bersama atau gerakan bersama melalui tindakan kolektif (*Action collective*), di luar lingkaran lembaga yang mapan. Hal ini sama dengan yang dikatakan Mansyur Fakih (2002:30) yang juga menyatakan gerakan sosial dapat diartikan sebagai kelompok yang terorganisir secara

tidak ketat dalam rangka tujuan sosial terutama dalam usaha perubahan struktur sosial. Lebih lanjut, Hebert Blumer (2004:6) yang merumuskan gerakan sosial sebagai sejumlah besar yang bertindak atas nama sejumlah tujuan atau gagasan.

Menurut Denny (Baiq.2005:1) ada tiga hal yang memunculkan gerakan sosial di antaranya sebagai berikut:

1. Gerakan sosial dilahirkan karena kondisi yang memberikan kesempatan gerakan itu. Pemerintah yang moderat misalnya memberi kesempatan yang lebih besar bagi timbulnya gerakan sosial ketimbang pemerintahan yang otoriter.
2. Gerakan sosial timbul karena luasnya ketidakpuasan atas institusi yang ada. Perubahan dari masyarakat tradisional ke moderat misalnya akan menimbulkan kesenjangan ekonomi yang semakin meluas antara kaya dan miskin. Perubahan ini juga dapat menyebabkan krisis identitas dan runtuhnya nilai-nilai sosial yang selama ini diagungkan. Perubahan itu akan menimbulkan gejolak protes dan kemudian meluas menjadi gerakan sosial.
3. Gerakan sosial semata-mata masalah kepemimpinan dari tokoh penggerak. Sang tokoh penggerak akan menjadi inspirator, membuat jaringan, membangun organisasi yang menyebabkan sekelompok termotivasi untuk terlibat dalam gerakan tersebut.

B. Pengertian Kemiskinan Kota

1. Pengertian kota

Kota merupakan pusat yang pesat akan hubungan sosial, ekonomi dan politik masyarakat, dimana kota menjadi sentral bertemunya beberapa ras, suku dan bahkan bangsa yang berbeda dan berhubungan sosial. kemunculan kota menurut Ibnu Khaldun (2013:42) dimulai setelah masyarakat nomadic, badawah atau badui dimana masyarakat sudah beradaban, sudah mengenal teknologi, sudah menetap, sudah bisa bercocok tanam, berusaha mencukupi kebutuhan masing-masing, tamah menghiraukan orang lain, dan kota dibangun atau didirikan atas sebuah kedaulatan yang kuat yang dapat mendirikan kota besar dengan monument yang besar pula atau solidaritas (ashabiyah). Karena sipat yang di bawah oleh manusia yaitu sendiri atau madaniyah menurut tabiatnya.

Masyarakat kota bisa dilihat dari beberapa segi perjuangannya diantaranya sebagai berikut.

- a. Akulturasi dimana hubungan kota ke desa atau desa ke kota menjadi tahapan awal perpaduan dua kultur budaya yang saling mempengaruhi, ini adalah yang terjadi di kota lewat bagaimana arus urbanisasi berlangsung
- b. Asimilasi menjadi hal yang terjadi di kota dimana pembaruan dua budaya yang disertai dengan hilangnya budaya asli seperti kaum urban yang sudah lama menetap di kota dan sudah meninggalkan kebiasaan primitifnya

- c. Adaptasi masyarakat di kota mempengaruhi tingkah laku sosialnya secara ekonomi politik dalam menata hubungan sosialnya dimana masyarakat yang dulunya bisa dibidang masih primitive atau badui itu sudah dibidang maju karna watak dari kota yang membentuk yaitu membangun.

Menurut Birtanto (Birtanto.2005:45) kota merupakan kesatuan jaringan kehidupan manusia yang ditandai dengan kepadatan penduduk yang tinggi dan diwarnai dengan strata sosial ekonomi yang heterogen, serta coraknya materialistik, masyarakat kota terdiri dari penduduk asli dan pendatang. Masyarakat kota merupakan masyarakat yang heterogen baik dalam mata pencarian agama, adat dan kebudayaan.

Menurut George E Hardoy (David.2008:41) mencirikan kota dengan beberapa ciri khas:

- a) Ukuran penduduk yang besar terhadap masa dan tempat.
- b) Bersifat permanen.
- c) Kepadatan minimum terhadap masa dan tempat.
- d) Struktur dan tata ruang perkotaan seperti yang diajukan oleh jalur-jalur jalan dan ruang ruang perkotaan yang nyata.
- e) Tempat masyarakat kerja dan tinggal.
- f) Fungsi perkotaan minimum yang diperinci meliputi sebuah pasar, sebuah pusat aktivitas intelektual dengan lembaga yang sama.
- g) Heterogenitas dan perbedaan yang bersifat hirarki pada masyarakat.

- h) Pusat ekonomi perkotaan menghubungkan dengan sebuah daerah pertanian ditepi kota dan memproses bahan mentah untuk pemasaran yang meluas.
- i) Pusat pelayanan bagi lingkungan setempat.
- j) Pusat penyebaran memiliki suatu falsafah hidup perkotaan pada masa dan tempat.

Max Weber (Weber.2008:36) kota merupakan sebuah tempat untuk memenuhi kebutuhan ekonominya di pasar lokal, ciri kota memiliki pasar sebagai benteng serta mempunyai sistem hukum sendiri dan bersifat kosmopolitan.

Granfield (David.2009:92) kota merupakan suatu pemukiman dengan kepadatan penduduk yang lebih tinggi dari pada kepadatan nasional, serta struktur pencarian non-agraris dan sistem penggunaan tanah yang beraneka ragam serta ditutupi oleh gedung-gedung tinggi yang lokasinya berdekatan.

Amor Rappoport (Marsen.2011:65) mendefinisikan kota menjadi dua defenisi:

- a) Definisi klasik melihat kota sebagai pemukiman yang relatif besar padat dan permanen terdiri dari kelompok individu-individu yang heterogen dari segi sosial.
- b) Definisi modern melihat kota sebagai pemukiman yang dirumuskan bukan dari ciri morfologi kota tapi suatu fungsi yang menciptakan ruang-ruang efektif melalui pengorganisasian dalam hirarki tertentu.

Djoko Sujarto (2016:25) memandang kota memiliki pengertian sebagai berikut:

- a) Demografi atau pemusatan penduduk tinggi dengan kepadatan tinggi jika dibandingkan dengan wilayah di sekitarnya.
- b) Sosiologi atau adanya sifat heterogen budaya urbanisasi yang mendominasi budaya desa.
- c) Ekonomi atau adanya proporsi lapangan pekerjaan yang dominan di sekitar non-pertanian seperti industri, transportasi dan pedagang.
- d) Fisik atau dominasi wilayah terbentuk dari struktur binaan.
- e) Administrasi atau suatu wilayah wewenang yang dibatasi oleh suatu wilayah yuridis yang ditetapkan.

Karl Marx (Erich.2012:550) menyatakan kota sebagai perserikatan yang terbentuk guna melindungi hak milik dan memperbanyak alat-alat produksi yang diperlukan agar masing-masing anggota dapat mempertahankan diri. Perbedaan antara kota dan desa menurut Marx adalah pemisahan yang besar antara kegiatan ekonomi dan rohani dengan materi individu-individu terbagi atas dua jenis tenaga kerja, hal ini mengakibatkan mengalami alienasi.

Marsen Sinaga (Marsen.2017:19) melihat kota sebagai pusat-pusat kekuasaan (politik dan ekonomi) yang terus menerus beradaptasi (secara politik, ekonomi dan budaya) terhadap perkembangan kapitalisme, yang dalam adaptasi itu yang tradisional disingkirkan atau dicaplok dan diperbaiki ulang lewat mantra modernisasi sesuai selera kapitalisme

2. . Kemiskinan Kota

Kemiskinan adalah sebuah posisi dimana seseorang atau masyarakat tidak memiliki harta benda yang bisa mencukupi kebutuhan hariannya dikarenakan pendapatan atau penghasilannya secara ekonomi sangat rendah. Kemiskinan juga bisa kita indikasikan sebagaimana kehidupan seseorang atau masyarakat yang berada dalam kehidupan yang tidak layak seperti pemukiman kumuh, kekurangan pangan dan layanan pendidikan dan kesehatan yang tidak memadai dalam aktivitas hariannya dalam kehidupan sosial bermasyarakat.

Purwanto (Suyanto.2010:26) memandang kemiskinan ialah suatu situasi atau kondisi yang dialami oleh seseorang atau kelompok orang yang tidak mampu menyelenggarakan sampai pada suatu taraf yang dianggap manusiawi.

Chambers (Purwiboyo.2005:36) melihat kemiskinan berkaitan dengan depresi sosial, akses mengenai air, tempat tinggal, layanan kesehatan, pendidikan dan pangan.

Haris White (2003:38) kemiskinan memiliki tiga sisi yaitu ekonomi, sosial dan politik. Secara ekonomi masyarakat tidak memiliki apa-apa (*giving nothing*), secara sosial tidak memiliki apa-apa (*being nothing*) dan secara politik mereka tidak mempunyai hak apa-apa (*right nothing*).

C. Upaya Kaum Miskin Kota

1. Perjuangan Politik Miskin Kota

Politik kaum miskin kota biasa kita artikan sebagai upaya perjuangan kaum miskin kota secara politik mempertahankan keberlangsungan hidupnya dan memajukan standar hidupnya lebih baik dan adil diperkotaan.

Menurut Roy Bhaskar (Roy.2016: 116) politik kaum miskin kota itu bertujuan merebut hak atas kota. Hak atas kota sendiri pada dasarnya merangkum dalam hak asasi manusia misalnya hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan pekerjaan layak, hak untuk bebas beragama, hak atas pendidikan dan kesehatan yang terjangkau dan yang lain sebagainya. Tetapi hak atas kota secara mendalam bukan hanya mendefinisikan dengan individu yang bebas mengakses sumber daya perkotaan saja, tetapi juga hak untuk mengubah kita melalui mengubah kota itu sendiri. Dengan demikian, hak atas kota bukan hanya semata hanya kepentingan kita sendiri, hak atas kota juga bukan hanya mendasar untuk perlawanan sewenang-wenang aparat birokrasi yang belum bisa menyediakan lapangan pekerjaan, tapi main gusur saja. Hak atas kota juga tentang bagaimana warga kota secara partisipatif menjadikan kota mereka sendiri sebagai tempat hidup yang manusiawi bagi semua orang, bukan hanya segelintir orang yang memiliki akses terhadap sumber daya. Sebab warga kotalah yang membentuk kota maka kontrol pun harus berada di tangan mereka. Pada akhirnya, merebut hak atas kota itu sendiri adalah perlawanan terhadap kapitalisme itu sendiri. Itu dikarenakan hak atas kota tidak akan komperatif dengan kerangka logika kapitalisme itu tentu saja

dibutuhkan kesadaran yang tinggi dari warga kota, terutama mereka yang terpinggirkan dalam logika kapitalisme, kesadaran ini dapat termanifestasi dalam bentuk organisasi seperti beberapa organisasi.

Tapi menurut lafebre (David.2010:45) fenomena penataan ruang kota saat ini sangat dipengaruhi oleh kepentingan modal kapitalisme membuat warga kota kehilangan hak atas kota itu sendiri dan hal tersebut selaras dengan analisis penelitian Arkomjogja yang menyatakan kota adalah pusat pusat kekuasaan (politik dan ekonomi) yang terus menerus beradaptasi (secara ekonomi, politik dan budaya) terhadap kapitalisme, yang mana dalam adaptasi itu yang tradisional disingkirkan atau dicaplok dan dipermak ulang lewat mantra modernisasi sesuai selera kapitalisme dan tidak salah bila kota kemudian direpresentasikan sebagai wadah subur kapitalisme Marsen Sinaga (Sinaga.2017: 23).

Dari penjelasan diatas menjelaskan bahwa ruang kota sangat potensial bagi kapitalisme melakukan ekspansi dilihat dari bagaimana kota menjadi tempat subur secara kekuasaan, baik kekuasaan politik maupun ekonomi dan menjadi titik paling diinginkan kapitalisme adalah ruang kota dimana ajang ekspansi dan kontestasi berlangsung, tempat dimana modal besar dan kuat menggilas modal kecil, tempat dimana kekuasaan dan kekayaan menindas kaum miskin. Karena menurut Marvin Harris (Mulyanto.2012:20) melihat kapitalisme pada ciri mendasar ialah komodifikasi hampir semua barang dan jasa, termasuk juga ruang, tenaga kerja dan hubungan sosial.

Tapi perjuangan politik dan perlawanan kaum miskin kota di kota punya titik dimana perjuangan tersebut punya tujuan untuk memberika ruang bagi kaum miskin kota yang selalu ingin disingkirkan dari kota lewat penggusuran secara berkala.

Perampasan ruang hidup, mempertahankan ruang hidup dan penguasaan ruang merupakan ungkapan-ungkapan yang umum dan jamak dikalangan gerakan sosial.

Menurut Marsen Sinaga (Marsen.2017:40-41) dilihat ruang secara empiris dipahami sebagai tempat (*place*) untuk hidup. Ruang (*space*) dan tempat (*place*) cenderung menjadi identik (sama) dalam cara pandang ini, pemahaman ini cenderung melihat ruang sebagai suatu yang tepat dan tidak bergerak alias mati. Jika tidak berhati hati, potret (pemetaan) atas ruang yang melihat ruang sebagai tempat yang tidak bergerak maka akan mengkaburkan makna ruang itu sendiri.

Massey (Marsen.2012:40) menawarkan pendekatan dan cara pandang berbeda sebagai alternatif apa itu ruang yang menurutnya itu lebih tepat untuk mewadahi gagasan dari gerakan-gerakan politik yang progresif. Gerakan inilah yang menjadi alternatif sebagai respon maraknya perampasan atas ruang hidup rakyat.

Massey memahami ruang dalam tiga aspek:

- a. Ruang dipahami sebagai perwujudan atau manifestasi dari beragam inter-relasi ruang senantiasa merupakan bentukan dari interaksi-interaksi.

- b. Ruang dipahami sebagai keberagaman yang hadir secara serentak. Ruang merupakan wadah yang merangkum keanekaragaman.
- c. Ruang dipahami sebagai suatu proses yang terus menerus, suatu yang senantiasa sedang dikerjakan dan sedang menjadi. Ruang dimaknai sebagai suatu yang tidak pernah selesai dan berakhir. Karena itu, ruang juga berarti kemungkinan tanpa batas.

Dari tiga aspek yang dijelaskan Massey (Marsen.2012:40) mengenai makna ruang ini muncul prinsip penting yang sangat relevan bagi kerja kerja menyangkut perjuangan keadilan ruang (hidup) prinsip penting itu adalah bahwa semua pencitraan atau representasi tata ruang, terutama peta yang dihasilkan senantiasa bersifat sementara dan merupakan wujud dari interaksi berbagai pihak dan kepentingan.

Ruang disini bukan semata dilihat sebagai area atau beberapa rumah bisa dibangun dengan arsitektur yang ramah lingkungan atau menonjolkan unsur unsur alami pada desain arsitekturnya, melainkan kesadaran identitas juga meniscayakan kesadaran akan kepentingan menjaga ekosistem lingkungan sebagai pendukung utamanya, termasuk penguasaan dan perlindungan alat-alat produksi seperti tanah dan sumber-sumber kehidupan lain, yang artinya kehidupan manusia beserta kebudayaanya dan tradisi di dalamnya juga harus dijaga, karena ruang berkaitan dengan aspek-aspek lain dalam kehidupan manusianya, yang mana aspek-aspek tersebut kadang bisa melintasi batas geografis dalam bentang satu atau lebih kawasan.

Problematika umum mengenai perebutan ruang kota bagi kaum miskin kota sangatlah dipengaruhi oleh bagaimana proses penyingkiran masyarakat miskin itu sendiri.

Menurut Roy dan Alsayyad (Roy dan Alsayyad.2016:58-59) kondisi pemukiman masyarakat di perkotaan selalu merupakan implikasi dari kebijakan atau persoalan lebih luas yang terjadi perkotaan, tempat dimana kondisi pemukiman memburuk dan kota mengalami satu atau lebih masalah seperti pendapatan perkapita, meningkatnya angka pengangguran, terbatasnya lahan murah di perkotaan, tidak efektifnya layanan pemerintah, pemerintah yang represif dan maraknya penggusuran. Maka diperlukan perjuangan yang sifatnya politik merebut ruang untuk bagaimana menciptakan kehidupan layak bagi warga miskin kota. Upaya yang dilakukan tidak jauh dari bagaimana kaum miskin kota membangun politiknya selaku upaya mempertahankan hidupnya.

Sunyoto (Wolf.2011;19) bahwa sebidang ruang menjadi wilayah kedaulatan politik manusia yang berada di atasnya, bukan hanya sebatas tempat tinggal tapi menjadi hal yang harus dipertahankan sampai titik darah penghabisan.

2. Konflik

a) Pengertian Konflik

Menurut Setiadi & Kolip (2011:345) istilah konflik secara etimologis berasal dari bahasa latin “*con*” yang berarti bersama dan

“*fligere*” yang berarti benturan atau tabrakan. Lebih lanjut Webster (Pearce dan Robinson.2008:9) menyatakan bahwa “*conflict*” dalam bahasa aslinya berarti suatu “perkelahian, peperangan, atau perjuangan” yaitu berupa konfrontasi fisik antara beberapa pihak. Tetapi arti kata itu berkembang dengan masukan “ketidaksepakatan yang tajam atau oposisi atas berbagai kepentingan ide, dan lain-lain”. Dengan demikian istilah tersebut sekarang juga menyentuh aspek psikologi, dibalik konfrontasi fisik yang terjadi selain konfrontasi fisik itu sendiri.

b) Bentuk Konflik

Secara garis besar konflik dalam masyarakat dapat diklarifikasikan kedalam beberapa bentuk berikut ini :

- Berdasarkan sifatnya

Berdasarkan sifatnya, menurut Lauer (Faqhi.2001:98) konflik dapat dibedakan menjadi konflik destruktif dan konflik konstruktif.

1) Konflik Destruktif merupakan konflik yang muncul karena adanya perasaan tidak senang, rasa benci dan dendam dari seorang ataupun kelompok terhadap pihak lain. Pada konflik ini terjadi bentrok-bentrok fisik yang mengakibatkan hilangnya nyawa dan harta benda seperti konflik Poso, Ambon, Kupang, Sambas dan lain sebagainya.

2) Konflik Konstruktif merupakan konflik yang bersifat fungsional. Konflik ini muncul karena adanya perbedaan pendapat dari kelompok-kelompok dalam menghadapi suatu permasalahan.

Konflik ini akan menghasilkan suatu konsensus dari berbagai pendapat tersebut dan menghasilkan suatu perbaikan. Misalnya perbedaan pendapat dalam sebuah organisasi.

- Berdasarkan Posisi Pelaku yang Berkonflik

Berdasarkan posisi pelaku yang berkonflik, Kusnadi (2002:67) membaginya menjadi 3 konflik yaitu :

- 1) Konflik vertikal merupakan konflik antar komponen masyarakat di dalam suatu struktur yang memiliki hirarki. Contohnya konflik yang terjadi antara atasan dengan bawahan dalam sebuah kantor.
- 2) Konflik horizontal merupakan konflik yang terjadi antar individu atau kelompok yang memiliki kedudukan yang relatif sama. Contohnya konflik yang terjadi antar organisasi massa.
- 3) Konflik diagonal merupakan konflik yang terjadi karena adanya ketidakadilan alokasi sumber daya keseluruhan organisasi sehingga menimbulkan pertentangan yang ekstrim. Contohnya konflik yang terjadi di Aceh.

c) Langkah-Langkah Penyelesaian Masalah menurut G.Polya

Polya Goerge (Veby.2012), memberikan saran untuk mengajar mahasiswa matematika dan mini ensiklopedia istilah heuristik. Buku yang telah diterjemahkan dalam 17 bahasa dan telah terjual lebih dari satu juta eksemplar ini, memperkenalkan 4 langkah dalam penyelesaian masalah yang disebut Heuristik. Heuristik adalah suatu langkah-langkah umum yang memandu pemecah masalah dalam menemukan solusi masalah.

Heuristik tidak menjamin solusi yang tepat, tetapi hanya memandu dalam menemukan solusi dan tidak menuntut langkah berurutan. Empat langkah tersebut yaitu memahami masalah, merencanakan pemecahan, melaksanakan rencana, dan melihat kembali.

1) Memahami Masalah

Pelajar seringkali gagal dalam menyelesaikan masalah karena semata-mata mereka tidak memahami masalah yang dihadapinya atau mungkin ketika suatu masalah diberikan kepada anak dan anak itu langsung dapat menyelesaikan masalah tersebut dengan benar, namun soal tersebut tidak dapat dikatakan sebagai masalah. Untuk dapat memahami suatu masalah yang harus dilakukan adalah pahami bahasa atau istilah yang digunakan dalam masalah tersebut, merumuskan apa yang diketahui, apa yang ditanyakan, apakah informasi yang diperoleh cukup, kondisi/syarat apa saja yang harus terpenuhi, nyatakan atau tuliskan masalah dalam bentuk yang lebih operasional sehingga mempermudah untuk dipecahkan. Kemampuan dalam menyelesaikan suatu masalah dapat diperoleh dengan rutin menyelesaikan masalah. Berdasarkan hasil dari banyak penelitian, anak yang rutin dalam latihan pemecahan masalah akan memiliki nilai tes pemecahan masalah yang lebih tinggi dibandingkan dengan anak yang jarang berlatih mengerjakan soal-soal pemecahan masalah. Selain itu, ketertarikan dalam menghadapi tantangan dan kemauan untuk menyelesaikan masalah merupakan modal utama dalam pemecahan masalah.

2) Merencanakan Pemecahan

Memilih rencana pemecahan masalah yang sesuai bergantung dari seberapa sering pengalaman kita menyelesaikan masalah sebelumnya. Semakin sering kita mengerjakan latihan pemecahan masalah maka pola penyelesaian masalah itu akan semakin mudah didapatkan. Untuk merencanakan pemecahan masalah kita dapat mencari kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi atau mengingat-ingat kembali masalah yang pernah diselesaikan yang memiliki kemiripan sifat/pola dengan masalah yang akan dipecahkan. Kemudian barulah menyusun prosedur penyelesaiannya.

3) Melaksanakan Rencana

Langkah ini lebih mudah dari pada merencanakan pemecahan masalah, yang harus dilakukan hanyalah menjalankan strategi yang telah dibuat dengan ketekunana dan ketelitian untuk mendapatkan penyelesaian.

4) Melihat Kembali

Kegiatan pada langkah ini adalah menganalisis dan mengevaluasi apakah strategi yang diterapkan dan hasil yang diperoleh benar, apakah ada strategi lain yang lebih efektif, apakah strategi yang dibuat dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah sejenis, atau apakah strategi dapat dibuat generalisasinya. Ini bertujuan untuk menetapkan keyakinan dan memantapkan pengalaman untuk mencoba masalah baru yang akan datang.

3. Perlawanan

a) Pengertian Perlawanan

Kekuasaan, sebagaimana yang dikemukakan Weber (Weber.2005:58). Merupakan kemampuan orang atau kelompok memaksakan kehendaknya pada pihak lain walaupun ada penolakan melalui perlawanan. Perlawanan akan dilakukan oleh kelompok masyarakat atau individu yang merasa tertindas, frustrasi, dan hadirnya situasi ketidakadilan di tengah-tengah mereka. Jika situasi ketidakadilan dan rasa frustrasi ini mencapai puncaknya, akan menimbulkan (apa yang disebut sebagai) gerakan sosial atau sosial movement, yang akan mengakibatkan terjadinya perubahan kondisi sosial, politik, dan ekonomi menjadi kondisi yang berbeda dengan sebelumnya.

Scott (Faqih.2002) mendefinisikan perlawanan sebagai segala tindakan yang dilakukan oleh kaum atau kelompok subordinat yang ditujukan untuk mengurangi atau menolak klaim (misalnya harga sewa atau pajak) yang dibuat oleh pihak atau kelompok superdinat terhadap mereka.

Scott membagi perlawanan tersebut menjadi dua bagian, yaitu: perlawanan publik atau terbuka (*public transcript*) dan perlawanan tersembunyi atau tertutup (*hidden transcript*). Kedua kategori tersebut, oleh Scott, dibedakan atas artikulasi perlawanan; bentuk, karakteristik, wilayah sosial dan budaya. Perlawanan terbuka dikarakteristikan oleh adanya interaksi terbuka antara kelas-kelas subordinat dengan kelas-kelas

superdinat. Sementara perlawanan sembunyi-sembunyi dikarakteristikan oleh adanya interaksi tertutup, tidak langsung antara kelas-kelas subordinat dengan kelas-kelas superdinat. Untuk melihat perbedaan yang lebih jelas dari dua bentuk perlawanan di atas, Scott mencirikan perlawanan terbuka sebagai perlawanan yang bersifat: Pertama, organik, sistematis dan kooperatif. Kedua, berprinsip atau tidak mementingkan diri sendiri. Ketiga, berkonsekuensi revolusioner, dan/atau Keempat, mencakup gagasan atau maksud meniadakan basis dominasi. Dengan demikian, aksi demonstrasi atau protes yang diwujudkan dalam bentuk unjuk rasa, mogok makan dan lain-lain merupakan konsekuensi logis dari perlawanan terbuka terhadap pihak superdinat.

Menurut Fakih Mansyur (Fakih.2006 :30), gerakan sosial diakui sebagai gerakan yang bertujuan untuk melakukan perubahan terhadap sistem sosial yang ada. Karena memiliki orientasi pada perubahan, dianggap lebih mempunyai kesamaan tujuan, dan bukan kesamaan analisis. Mereka tidak bekerja menurut prosedur baku, melainkan menerapkan struktur yang cair dan operasionalnya lebih diatur oleh standar yang muncul saat itu untuk mencapai tujuan jangka panjang. Mereka juga tidak memiliki kepemimpinan formal, seorang aktivis gerakan sosial tampil menjadi pemimpin gerakan karena keberhasilannya mempengaruhi massa dengan kepiawaiannya dalam memahami dan menjelaskan tujuan dari gerakan serta memiliki rencana yang paling efektif dalam mencapainya.

Soekanto dan Susilo memberikan empat ciri gerakan sosial, yaitu: Pertama, tujuannya bukan untuk mendapatkan persamaan kekuasaan, akan tetapi mengganti kekuasaan. Kedua, adanya penggantian basis legitimasi, Ketiga, perubahan sosial yang terjadi bersifat massif sehingga mempengaruhi seluruh masyarakat, dan Keempat, koersi dan kekerasan biasa dipergunakan untuk menghancurkan rezim lama dan mempertahankan pemerintahan yang baru. Dan Smelser menyatakan, bahwa gerakan sosial ditentukan oleh lima faktor. Pertama, daya dukung struktural (*structural conduciveness*) di mana suatu perlawanan akan mudah terjadi dalam suatu lingkungan atau masyarakat tertentu yang berpotensi untuk melakukan suatu gerakan massa secara spontan dan berkesinambungan (seperti lingkungan kampus, buruh, petani, dan sebagainya). Kedua, adanya tekanan-tekanan struktural (*structural strain*) akan mempercepat orang untuk melakukan gerakan massa secara spontan karena keinginan mereka untuk melepaskan diri dari situasi yang menyengsarakan. Ketiga, menyebarkan informasi yang dipercayai oleh masyarakat luas untuk membangun perasaan kebersamaan dan juga dapat menimbulkan kegelisahan kolektif akan situasi yang dapat menguntungkan tersebut. Keempat, faktor yang dapat memancing tindakan massa karena emosi yang tidak terkendali, seperti adanya rumor atau isu-isu yang bisa membangkitkan kesadaran kolektif untuk melakukan perlawanan. Kelima, upaya mobilisasi orang-orang untuk melakukan tindakan-tindakan yang telah direncanakan.

Sedangkan perlawanan sembunyi-sembunyi dapat dicirikan sebagai perlawanan yang bersifat: Pertama, tidak teratur, tidak sistematis dan terjadi secara individual. Kedua, bersifat oportunistik dan mementingkan diri sendiri. Ketiga, tidak berkonsekuensi revolusioner, dan keempat adalah lebih akomodatif terhadap sistem dominasi. Oleh karena itu, gejala-gejala kejahatan seperti: pencurian kecil-kecilan, hujatan, makian, bahkan pura-pura patuh (tetapi dibelakang membangkang) merupakan perwujudan dari perlawanan sembunyi sembunyi. Perlawanan jenis ini bukannya bermaksud atau mengubah sebuah sistem dominasi, melainkan lebih terarah pada upaya untuk tetap hidup dalam sistem tersebut sekarang, minggu ini, musim ini. Percobaan-percobaan untuk menyedot dengan tekun dapat memukul balik, mendapat keringanan marjinal dalam eksploitasi, dapat menghasilkan negosiasi-negosiasi tentang batas-batas pembagian, dapat mengubah perkembangan, dan dalam peristiwa tertentu dapat menjatuhkan sistem. Tetapi semua itu hanya merupakan akibat-akibat yang mungkin terjadi, sebaliknya, tujuan mereka hampir selalu untuk kesempatan hidup dan ketekunan. Kebanyakan dari tindakan ini (oleh kelas-kelas lainnya) akan dilihat sebagai keganasan, penipuan, kelalaian, pencurian, kecongkakan-singkat kata semua bentuk tindakan yang dipikirkan untuk mencemarkan orang-orang yang mengadakan perlawanan.

Perlawanan ini dilakukan untuk mempertahankan diri dan rumah tangga, dapat bertahan hidup sebagai produsen komoditi kecil atau

pekerja, mungkin dapat memaksa beberapa orang dari kelompok ini menyelamatkan diri dan mengorbankan anggota lainnya sehingganya dalam melakukan perlawanan sering terjadi indikasi adanya intimidasi dan refresifitas dari aparat Negara dan dari lawan politiknya.

Scott menambahkan, bahwa perlawanan jenis ini (sembunyi-sembunyi) tidak begitu dramatis, namun terdapat di mana-mana, melawan efek-efek pembangunan kapitalis asuhan negara. Perlawanan ini bersifat perorangan dan seringkali anonim. Terpencar dalam komunitas-komunitas kecil dan pada umumnya tanpa sarana-sarana kelembagaan untuk bertindak kolektif, menggunakan sarana perlawanan yang bersifat lokal dan sedikit memerlukan koordinasi. Koordinasi yang dimaksudkan disini, bukanlah sebuah konsep koordinasi yang dipahami selama ini, yang berasal dari rakitan formal dan birokratis. Tetapi merupakan suatu koordinasi dengan aksi-aksi yang dilakukan dalam komunitas dengan jaringan jaringan informasi yang padat dan sub kultur-sub kultur perlawanan yang kaya.

Zubir (Zubir.2002:27) menyatakan bahwa perlawanan yang dilakukan oleh kelompok pinggiran (seperti buruh, kaum miskin kota, petani, dan lain-lain) bersifat sporadis. Dalam memperjuangkan keinginannya, gerakan ini tidak memiliki strategi perjuangan yang jelas sehingga lebih mudah untuk dipadamkan oleh pihak-pihak yang berkuasa. Apabila gerakan ini telah dimasuki oleh unsur ideologis, maka gerakan ini akan menjadi suatu gerakan yang radikal. Dalam percaturan politik, massa

dari kelompok ini menjadi lahan perebutan yang subur dari berbagai kelompok yang bertikai. Ia memiliki tujuan yang jelas dan dalam gelombang yang besar, gerakan ini memiliki kecenderungan melawan arus zaman, arus dari status quo yang berkuasa. Gerakan seperti ini biasanya dipelopori oleh mahasiswa sebagai aktor intelektual (Zubir, 2002;28).

Adanya empat faktor yang menentukan intensitas perlawanan dan potensi untuk melakukan tindakan politis sebagai jalan keluar yaitu seberapa parah tingkat keterbelakangan atau penderitaan kolektif komunal itu dibandingkan dengan kelompok lain, kekuatan atau ketegasan identitas kelompok yang merasa terancam, keandalan derajat kohesi dan mobilisasi kelompok, dan kontrol represif atau daya paksa tidak adil oleh kelompok-kelompok dominan. Seperti yang diikuti oleh paper yang berjudul "*large dam victims and their defenders: the emergence of an anti-large dam movement in Indonesia*", yang kemudian dikutip oleh Sangaji (2000:41), terdapat tiga karakteristik gerakan sosial, yakni: identifikasi, oposisi, dan totalitas. Identifikasi berkaitan dengan aktor-aktor gerakan yang dibedakan kedalam dua kelompok, yaitu para korban (peremajaan pasar) dan para pembelanya. Oposisi berhubungan dengan apa (siapa) yang hendak ditentang. Dan prinsip totalitas berhubungan dengan teori-teori yang mendasari gerakan tersebut.

Berkaitan dengan cara-cara pengungkapan atau ekspresi perlawanan, Sangaji (2000:41) membagi kedalam dua bentuk, yakni:

1) Perlawanan yang diungkapkan secara individual

Aksi perlawanan secara individu dilakukan karena adanya sebuah bentuk kekecewaan terhadap sesuatu berkaitan dengan sebuah kepentingan.

2) Perlawanan yang diungkapkan secara kolektif

Perlawanan yang dilakukan melalui tindakan-tindakan kolektif atau bersama.

Kedua bentuk perlawanan tersebut diekspresikan dalam beragam cara, mulai dari aksi protes terbuka yang diungkap melalui media massa, surat protes, pengiriman delegasi, atau melalui kesempatan dialog, seminar, hingga cara-cara tertutup, seperti aksi tutup mulut dan tidak menghadiri pertemuan dengan rival. Di samping itu, perlawanan yang dilakukan oleh kelompok pinggiran ini juga mendapat dukungan dari organisasi atau individu yang umumnya berasal dari kalangan terpelajar, seperti mahasiswa, NGO, tokoh intelektual setempat (Sangaji, 2000). Mereka dibedakan atas dua kategori, yaitu:

1) Para pendukung spesialis, yakni individu dan organisasi yang secara spesifik membangun keterampilan dan ideologi untuk menentang kebijakan tersebut.

2) Para pendukung umum, yakni individu atau organisasi yang menganggap pembelaan tersebut merupakan bagian dari perjuangan menegakkan hak asasi dan keadilan (Sangaji, 2000).

Sangaji (2000:42) menambahkan, bahwa alasan dilakukannya perlawanan oleh pelaku perlawanan dibagi atas dua. Pertama, alasan yang berdimensi sosio-kultural dan berkaitan dengan tanah leluhur. Biasanya alasan ini diungkapkan oleh penduduk asli. Kedua, alasan-alasan yang bersifat sosial, ekonomi, biasanya diungkapkan oleh penduduk pendatang yang telah lama bermukim di tempat tersebut.

4. Peranan Pemerintah

Tugas dan fungsi pemerintah, pemerintah merupakan suatu gejala yang berhubungan dalam kehidupan bermasyarakat yaitu hubungan manusia dengan setiap kelompok termasuk dalam keluarga. Masyarakat sebagai suatu gabungan dari sistem sosial akan senantiasa menyangkut unsur-unsur pemenuhan kebutuhan dasar manusia seperti keselamatan, istirahat, pakaian dan makanan. Dalam memenuhi kebutuhan dasar itu, manusia perlu bekerja sama dan berkelompok dengan orang lain. Lahirnya pemerintah pada awalnya adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban di dalam masyarakat, sehingga masyarakat tersebut bisa menjalankan kehidupan secara wajar. Seiring dengan perkembangan masyarakat modern yang ditandai dengan meningkatnya kebutuhan, peran pemerintah kemudian berubah menjadi melayani masyarakat. Pemerintah modern, dengan kata lain pada hakikatnya adalah pelayan kepada masyarakat.

Pemerintah tidaklah diadakan untuk melayani diri sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap

anggota mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya demi mencapai kemajuan bersama.

Rasyid (2000:13) mengatakan bahwa pemerintah yang demokrasi lahir untuk melayani warganya dan karena itulah tugas pemerintah adalah mencari cara untuk menyenangkan warganya. Dengan demikian lahirnya pemerintah memberikan pemahaman bahwa kehadiran suatu pemerintah merupakan manifestasi dari kehendak masyarakat yang bertujuan untuk berbuat baik bagi kehidupan dan kepentingan masyarakat, pemerintah dapat dipandang sebagai suatu ilmu yang mengajarkan bagaimana mengarahkan dan memimpin pelayan umum.

D. Kerangka Pikir

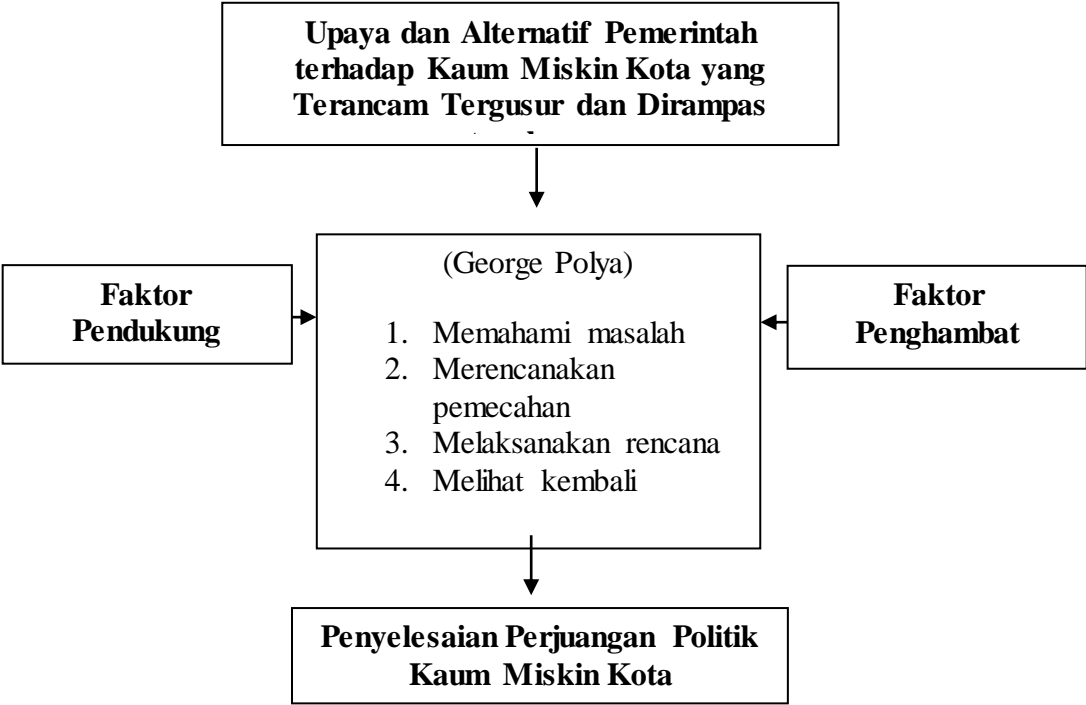
Perampasan ruang hidup bagi kaum miskin kota di Makassar menjadi sebuah masalah bagi warga miskin kota. Maraknya perampasan lahan secara berkala dan penggusuran menjadi beban berat bagi warga miskin kota yang tinggal di kota.

Hal inilah yang memunculkan perjuangan politik kaum miskin kota di Makassar sebagai bentuk respon terhadap ancaman penggusuran dan perampasan lahan sebagaimana yang telah terjadi di Bulogading dan Kampung Berua,.

Pembangunan yang dilakukan pemerintah selalu tidak melihat kondisi rakyatnya yang berada di bawah kemiskinan. Untuk itu, perjuangan politik menjadi solusi alternatif bagi kaum miskin kota untuk dapat mempertahankan hidup, mendapatkan keadilan dan untuk mendapatkan ruang di kota. Ambisi pembangunan

kota dunia yang digarap Pemerintah Kota dengan kondisi masyarakat miskin kota yang berada di bawah standar kota dunia seperti pemukiman kumuh, lahan yang sempit dan berserakan menjadi argumentasi untuk menghalalkan praktik pemerintah dalam melakukan pengusuran dan perampasan lahan dengan alasan pembangunan dan perekonomian yang hanya dinikmati segelintir orang.

Bagan Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah metode penelitian kualitatif. Meleong (1996:27) mendefinisikan penelitian Kualitatif sebagai suatu penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara ilmiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti. Fokus penelitian ditekankan pada perjuangan politik kaum miskin kota sebagai studi kajian sosial politik dan kemasyarakatan kota Makassar yang meliputi hal sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perjuangan politik kaum miskin kota di Makassar?
2. Bagaimana capaian perjuangan politik kaum miskin kota di Makassar?
3. Apa saja faktor penghalang perjuangan politik kaum miskin kota di Makassar?

Serta hal hal lain yang akan berkembang saat penelitian ini dilaksanakan.

B. Lokasi Penelitian

Objek penelitian ini adalah warga Bulogading Kecamatan Ujung Pandang dan Kampung Berua Kecamatan Tamalate Kota Makassar Sulawesi Selatan. Meliputi

rangkaian dan proses perjuangan politik kaum miskin Kota Makassar yang melakukan perjuangan politik guna mempertahankan hidupnya dari penyingkiran ruang kota itu sendiri.

C. Informasi Penelitian

Informan penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian (Moleong,2000,: 97). Penelitian kualitatif tidak dimaksudkan untuk membuat generalisasi dari hasil penelitiannya. Subjek penelitian menjadi informan yang akan memberikan berbagai informasi yang diperlukan selama proses penelitian. Informan penelitian mencakup tiga macam yaitu (1) informan kunci yaitu mereka yang mengetahui dan memiliki informan pokok yang diperlukan dalam penelitian, (2) informan biasa, yaitu mereka yang terlibat secara langsung dalam interaksi sosial yang diteliti, (3) informan tambahan, yaitu mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial yang sedang diteliti (Hendarso dalam suyanto,2005: 171-172).

Dari penjelasan di atas, maka penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* dalam menentukan informannya. *Purposive sampling* merupakan penentuan informan yang tidak didasarkan atas strata, kedudukan, pedoman, atau wilayah tetapi didasarkan pada adanya tujuan dan pertimbangan tertentu yang tetap berhubungan dengan permasalahan penelitian. Yang menjadi informan penelitian adalah :

1. Informan kunci yaitu terdiri dari 5 orang, 2 orang dari warga miskin kota, 1 orang dari Dinas Penataan Ruang Kota Makassar, 1 orang dari Lembaga Bantuan Hukum Kota Makassar selaku pengacara dan Advokat warga.
2. Informan biasa yaitu warga kota yang terlibat langsung dalam perjuangan politik kaum miskin kota di Makassar yaitu 5 orang pengurus dari organisasi perjuangan politik kaum miskin Kota Makassar
3. Dalam usaha menentukan informasi tambahan, pemilihan informan tabahan menggunakan *teknik Accidental* yaitu penarikan sampel secara kebetulan. Sebanyak 10 orang yang terlibat dari perjuangan politik kaum miskin kota di Makassar akan dijadikan sebagai informan tambahan.

D. Fokus Penelitian

Adapun fokus penelitian ini adalah untuk melihat sejauh mana perjuangan politik kaum miskin kota di Makassar dan apa kendala dari perjuangannya.

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh kebenaran pengetahuan yang bersifat alamiah melalui proses yang telah ditetapkan.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat bantu yang digunakan oleh peneliti dalam melaksanakan tugas penelitian. Sedangkan instrumen data ialah alat bantu yang digunakan oleh peneliti untuk memaksimalkan hasil data yang diperoleh.

Adapun beberapa instrumen yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Pedoman Observasi

Metode yang digunakan dengan cara mengamati dan mengadakan komunikasi secara langsung dengan sumber informasi (informan) tentang kondisi dan lokasi. Dalam hal ini peneliti berkomunikasi antara warga dan pengorganisir kaum miskin kota.

2. Pedoman Angket

Metode pengumpulan data dengan memberi pertanyaan tertulis dalam bentuk *multiple choice* kepada informan untuk memperoleh data yang diperlukan.

3. Pedoman Wawancara

Metode yang digunakan dengan jalan tanya jawab atau bercakap kepada responden untuk memperoleh data.

4. Catatan Dokumentasi

Mengumpulkan data yang berhubungan dengan permasalahan melalui dokumentasi tertulis maupun arsip.

F. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan melalui observasi, dokumentasi dan wawancara. Yaitu data yang

diperoleh langsung dari informan melalui tatap muka langsung dan terbuka sesuai dengan yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber bacaan dan berbagai macam sumber lainnya yang terdiri dari surat-surat pribadi, buku harian, dan dokumen-dokumen dari berbagai instansi pemerintah. Data sekunder diperlukan untuk melengkapi data primer yang dikumpulkan. Hal ini dilakukan sebagai upaya penyesuaian dengan kebutuhan data lapangan yang terkait dengan objek yang dikaji. Data sekunder terutama diperoleh melalui dokumentasi. Peneliti menggunakan data sekunder ini untuk memperkuat penemuan dan melengkapi informasi yang telah dikumpulkan, serta data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, referensi-referensi, peraturan perundang-undangan, dokumen, observasi yang diperoleh dari lokasi penelitian.

G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh informasi atau data yang akurat sehingga dapat dipertanggungjawabkan sebagai suatu penelitian sosial yang ilmiah. Adapun cara-cara tersebut dapat dibagi atas tiga bagian, yakni melalui observasi atau pengamatan, wawancara dan dokumentasi.

1. Observasi

Observasi yaitu pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan langsung terhadap objek penelitian mengenai perjuangan politik kaum miskin kota di Makassar dan upaya politik kaum miskin kota Makassar

2. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan penelitian untuk mendapat keterangan-keterangan biasa melalui percakapan dan berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan pada obyek penelitian.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu pencatatan dokumen dan data yang berhubungan dengan penelitian ini. Data ini berfungsi sebagai bukti dari hasil wawancara di atas. Kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh data yang diperlukan dengan menelusuri dan mempelajari dokumen-dokumen yang sudah ada. Hal ini dimaksud untuk mendapatkan data dan informasi yang berhubungan dengan materi penelitian. Studi dokumentasi dilakukan dengan mempelajari buku-buku dan hasil laporan lain yang ada kaitannya dengan obyek penelitian.

H. Teknik Analisis Data

Proses analisis data dimulai dengan menelaah informasi atau data yang telah didapat, baik yang diperoleh dari wawancara, pengamatan, ataupun dari studi terhadap dokumen-dokumen. Keseluruhan data yang didapat tersebut dirangkum dan dikategorisasikan sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian. Selanjutnya kategori-kategori yang telah diklasifikasikan tersebut dikonstruksikan dengan pendekatan kualitatif dalam sebuah deskripsi untuk kemudian dianalisis sehingga memungkinkan diambil kesimpulan yang utuh.

Data yang telah dikumpulkan yaitu analisa yang berwujud keterangan dan uraian yang menggambarkan objek penelitian pada saat ini berdasarkan fakta-fakta sebagaimana adanya yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat untuk memperoleh kesimpulan. Adapun maksud dengan metode ini adalah bahwa analisa data dilakukan secara kualitatif berdasarkan data yang ada dari data sampel dengan menghubungkan informasi yang diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan beberapa informan.

Metode analisis yang dipergunakan pada penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian kemudian ditafsirkan dengan kalimat yang bersifat kualitatif. Hasil analisis data tersebut dijadikan kesimpulan akhir dalam penelitian. Teknik analisis data mempunyai beberapa proses yaitu:

1. Mencatat, yang menghasilkan catatan lapangan. Dilakukan pengkodean agar sumber datanya tetap dapat ditelesuri.
2. Mengumpulkan, memilih-milih, mengklasifikasikan, mensintesiskan, membuat ikhtisar, dan membuat indeksinya.
3. Berpikir, dengan jalan membuat agar kategori data itu mempunyai makna, mencari dan menemukan pola dan hubungan-hubungan, dan membuat temuan-temuan umum.

I. Teknik Keabsahan Data

Validasi data sangat mendukung hasil akhir penelitian, oleh karena itu diperlukan teknik untuk memeriksa keabsahan data. Keabsahan data dalam penelitian ini diperiksa dengan menggunakan teknik triangulasi.

Dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Teknik seperti ini juga menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Obyek Penelitian

1. Profil Administrasi Wilayah Kota Makassar

Makassar (Makassar: dari 1971 hingga 1999 secara resmi dikenal sebagai Ujung Pandang) adalah ibu Kota Provinsi Sulawesi Selatan. Makassar merupakan Kota Internasional, serta terbesar di kawasan Indonesia Timur dan pada masa lalu pernah menjadi ibukota Negara Indonesia Timur Provinsi Sulawesi. Makassar terletak di pesisir Barat daya Pulau Sulawesi dan berbatasan dengan Selat Makassar di sebelah Barat, Kabupaten Kepulauan Pangkajene di sebelah Utara, Kabupaten Maros di sebelah Timur dan Kabupaten Gowa di sebelah Selatan.

Dari aspek pembangunan dan infrastruktur, Kota Makassar tergolong salah satu kota metropolitan di Indonesia, yaitu urutan kedua terbesar di luar pulau Jawa setelah Kota Medan. Dengan memiliki wilayah seluas 199,26 km² dan jumlah penduduk lebih dari 1,6 juta jiwa, Kota Makassar ini berada di urutan kelima berpenduduk terbesar di Indonesia setelah Jakarta, Surabaya, Bandung dan Medan. Secara demografis, kota ini tergolong tipe multi-etnik atau multi-kultur dengan beragam suku bangsa yang menetap di dalamnya, di antaranya yang signifikan jumlahnya adalah Bugis, Toraja, Mandar, Buton, Jawa dan Tionghoa.

Secara administratif Kota Makassar terdiri dari 14 kecamatan dan 143 kelurahan yaitu:

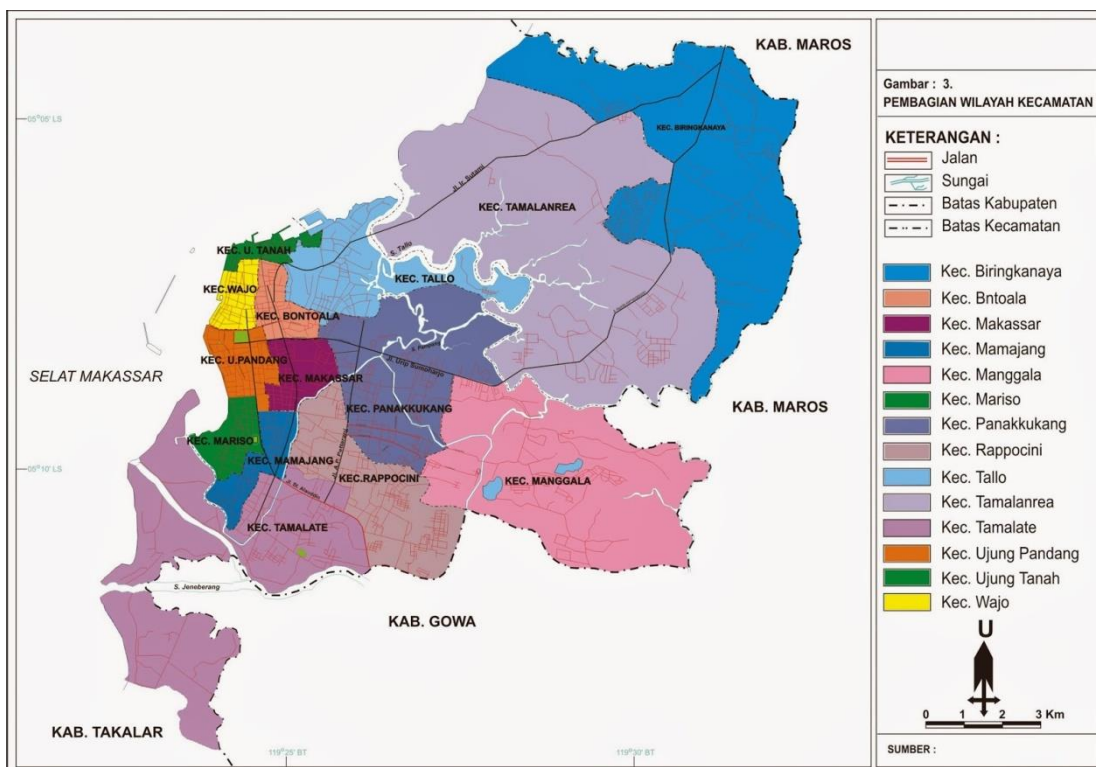
- | | |
|---------------------------|-----------------------------|
| 1. Kecamatan Biringkanaya | 8. Kecamatan Tamalanrea |
| 2. Kecamatan Mamajang | 9. Kecamatan Panakukang |
| 3. Kecamatan Bontoala | 10. Kecamatan Ujung Tanah |
| 4. Kecamatan Makassar | 11. Kecamatan Ujung Pandang |
| 5. Kecamatan Mariso | 12. Kecamatan Wajo |
| 6. Kecamatan Rappocini | 13. Kecamatan Manggala |
| 7. Kecamatan Tallo | 14. Kecamatan Tamalate |

Batas Utara Kabupaten Pangkajene Kepulauan, batas Selatan Kabupaten Gowa, Batas Timur Kabupaten Maros, dan batas Barat Selat Makassar. Kota Makassar mempunyai posisi strategis karena berada di persimpangan jalur lalu lintas dari arah Selatan dan Utara dalam Provinsi di Sulawesi, dari wilayah kawasan Barat ke wilayah kawasan Timur Indonesia dan dari wilayah Utara kewilayah Selatan Indonesia. Dengan kata lain, secara geografis Kota Makassar terletak antara 119 derajat bujur Timur dan 5,8 derajat lintang Selatan dengan ketinggian yang bervariasi antara 1-25 meter dari permukaan laut. Kota Makassar merupakan daerah pantai yang datar dengan kemiringan 0-5 derajat ke arah Barat, diapit oleh dua muara sungai, yakni sungai Tallo yang bermuara di bagian Utara kota dan sungai Jene berang yang bermuara di Selatan Kota.

Luas wilayah Kota Makassar seluruhnya adalah kurang lebih 175,77 Km² daratan dan termasuk 11 pulau di selat Makassar, ditambah luas wilayah

perairan kurang lebih 100 Km² adalah kota besar dengan penduduk mencapai lebih dari 1,3 juta. Makassar juga merupakan kota tujuan di bagian Timur Indonesia menjadi kota niaga dan bisnis penting di bagian Timur Indonesia, sehingga lalu lintas manusia dari dan ke Makassar terus mengalami peningkatan. Lalu lintas manusia tersebut ditambah dengan penduduk yang menetap mengakibatkan Makassar semakin padat dan macet.

Gambar peta administrasi Kota Makassar



2. Profil Sosial Ekonomis Kota Makassar

Penyebaran penduduk Kota Makassar menunjukkan bahwa penduduk terkonsentrasi di wilayah kecamatan Tamalate yaitu sebanyak 143.987 atau sekitar 12,21 % dari total penduduk, disusul kecamatan Rappocini sebanyak 136,128 jiwa atau 11,55 %, Kecamatan Panakkukang sebanyak 129,240 jiwa atau 10,98 % dan yang terendah Kecamatan Ujung Pandang sebanyak 27165 jiwa atau 2,30 %.

Sejalan dengan perkembangan Kota Makassar, kegiatan ekonomi juga semakin pesat. Ini ditandai dengan meningkatnya jumlah perusahaan perdagangan, kawasan utama memakan ruang berupa *mall*/pusat perbelanjaan terbesar di beberapa kecamatan dan 200 hektar tanah yang digunakan untuk industri di Kawasan Industri Makassar (KIMA). Ini sejalan dengan kontribusi perdagangan, hotel dan *restaurant* yang memiliki persentase tertinggi yakni 27,96 persen bagi Kota Makassar.

Secara ekonomi kota Makassar tergolong maju. Menurut sebuah laporan perusahaan konsultan, Sulawesi sekarang memiliki kecenderungan konsumsi ritel yang sama dengan Jawa, bahkan untuk kebiasaan belanja harian Sulawesi lebih tinggi. Kota yang mayoritas penduduknya beragama Islam dengan sumber penghasilan sebagian adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS), perindustrian, buruh, pengusaha, tukang bontor dan angkot dan sebagian bergerak di bidang perdagangan dan tingginya tingkat pencari kerja dan keluarga penerima BLT amat kontras dengan pertumbuhan *mall* saat ini, hal ini menunjukkan kondisi

sosial ekonomi masyarakat Makassar masih berada pada taraf yang belum cukup mapan.

3. Kampung berua

Keberadaan pemukiman warga Kampung Berua ada sejak 40 tahun yang lalu dengan rata-rata penduduk yang tinggal kisaran ada yang menempati 40, 30, 20 di dalam distrik peukiman kaum miskin kota, dari 120 KK, dan jumlah kesuluruhan ada 500 orang yang terdiri dari; 100 anak-anak sampai remaja; 400 orang dewasa sampai lansia.

Persentase kondisi sosial-ekonomi masyarakat cukup minim karena mayoritas masyarakat bekerja sebagai buruh (65%), kemudian Tukang Bentor 10%, yang memiliki usaha rumahan 17%, dan selebihnya adalah kaum pengangguran. Kondisi inilah yang oleh Pemerintah Kota dianggap sebagai wilayah kumuh dan tidak layak. Oleh karenanya, upaya eksekusi penertiban berupa penggusuran dilakukan oleh Pemerintah Kota lantaran pemukiman tersebut dinilai tidak layak secara estetika kota dan wilayah hunian.

Aspek sosial kemasyarakatan Kampung Berua, tidak ada bedanya dengan tipekal warga kota yang terpolarisasi sebagai masyarakat urban, dimana hubungan sosial ditinjau dari aspek kekerabatan atau ketetanggaan. masyarakat kampung berua juga bisa dilihat dari pembagian kalangan atau golongan sosial seperti

a. santri yaitu masyarakat kampung berua secara religius masih kuat walaupun tidak semua tapi nilai nilai religius masih kuat utamanya umat islam karna yang mendominasi masyarakat kampung berua itu beragama islam.

b. partisipan yaitu masyarakat yang terlibat aktif dalam partisipasi sosial, politik dan kemasyarakatan, baik yang terlibat dalam partai politik maupun organisasi sosial yang politis. seperti di kampung berua

c. dan golongan yang tidak ada di kampung berua yaitu golongan priyayi atau bangsawan

Ancaman penggusuran datang pada tanggal 15 Februari 2015 berupa surat SOMASI dari pihak penggugat, dalam hal ini H. Jufri. Penggugat secara langsung mendatangi warga dengan pengawalan dari aparat Kepolisian tanpa melalui prosedur peradilan yang berlaku. Tanpa adanya gugatan dari H. Jufri kepada warga selaku ahli waris dari Alm. Syamsuddin Tata, pemilik sah lahan 1400 m². Tanggal 15 Februari 2017 dimulainya perjuangan politik warga, dengan targetan yang jelas. Walaupun perjuangan politik sudah dimulai sejak saat somasi diedarkan. Selama masa perjuangan politis warga, ancaman eksekusi lahan masuk ke pemukiman warga dikarenakan hanya perjuangan untuk sebatas mempertahankan pemukiman warga secara spontan.

Perjuangan politik yang dilakukan warga hingga hari ini mulai membaik karena sudah memiliki struktur perjuangan yang jelas. Bukan hanya bersandar pada tuntutan hak atas tempat tinggal saja, tetapi juga tuntutan perbaikan

kondisi ekonomi,; pendidikan, fasilitas dan infrastruktur. Melalui sebuah wadah organisasi perjuangan politik yang mereka sebut dengan nama Forum Perjuangan Warga Kota (FORWA), mereka bekerja sama dengan beberapa LSM seperti Komite Perjuangan Rakyat Miskin Kota (KPRM) dan Elemen Gerakan Mahasiswa.

4. Bulogading

Bulogading, adalah sebuah pemukiman warga kota yang dihuni secara turun-temurun dari nenek moyang mereka sampai ke generasi sekarang. Karena letaknya yang berada di dalam pusat kota yang sangat strategis secara perekonomian Kota Makassar, selain sebagai *resort* dan tempat hiburan, Bulogading juga sebagai wilayah dengan tingkat perekonomian yang sangat pesat. Hal ini yang menyebabkan wilayah Bulogading menjadi incaran oleh investor-investor besar, dan hal inilah yang menyebabkan pemukiman tersebut terancam tergusur selain dari karena wilayah tersebut terindikasi sebagai distrik pemukiman kumuh kaum miskin Kota Makassar.

Rata-rata mata pencarian warga terdiri dari 40% pedagang kaki lima (PKL) sepanjang Pantai Losa, 30% Juru Parkir dan selebihnya usaha rumahan dan pengangguran dari 43 KK yang dari keseluruhan warga Bulogading.

Aspek sosial kemasyarakatan bulogading juga tidak ada bedanya dengan warga di kampung berua dimana masyarakatny juga tidak ada bedanya dengan tipekal warga kota yang terpolarisasi sebagai masyarakat urban, dimana

hubungan sosial ditinjau dari aspek kekerabatan atau ketetanggaan. masyarakat kampung berua juga bisa dilihat dari pembagian kalangan atau golongan sosial seperti

a. santri yaitu masyarakat bulogading secara religius masih kuat walaupun tidak semua tapi nilai nilai religius masih kuat utamanya ummat islam karna yang mendominasi masyarakat bulogading itu beragama islam. walaupun secara perilaku masyarakat itu jauh dari standar standar keislaman secara perilaku itu dikarenakan karakter wilayah tersebut apalagi dekat dengan daerah daerah hiburan malam.

b. partisipan yaitu masyarakat yang terlibat aktif dalam partisipasi sosial, politik dan kemasyarakatan, baik yang terlibat dalam partai politik maupun organisasi sosial yang politis seperti di bulogading sendiri

c. priyayi yaitu golongan bangsawan di bulogading sendiri ternyata masih ada darah bangsawan yang tinggal disana walau hanya beberapa orang tapi dia mengklaim diri sebagai keturunan karaeng galesong.

Juli 2007, terbit surat dari Pengadilan Negeri Makassar berupa perintah pengosongan lokasi. Tetapi warga menolak putusan tersebut lantaran tidak adanya proses peradilan berupa gugatan dari penggugat. Warga meresponnya dengan cara melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri (PN) Makassar sembari melakukan upaya-upaya politis berupa aksi-demonstrasi guna mendesak pengadilan yang serta-merta melayangkan surat perintah

pengosongan tanpa melalui proses peradilan yang melibatkan warga yang menempati wilayah tersebut.

Tahun 2008, proses persidangan pertama yang dikawal oleh Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Makassar (YLBHM) bersama dengan LSM dan elemen Mahasiswa yang waktu itu mengalami kekalahan di tahun 2009. Tetapi selanjutnya direspon dengan gugatan banding sampai tingkat Mahkamah Konstitusi (MK) sampai pada tahun 2011 dan mengalami kekalahan akibat dari adanya kongkalikong antara pihak investor dan pemerintah dalam hal ini Pengadilan dan Badan Pertanahan.

Dari sinilah warga mengambil inisiatif bersama beberapa LSM dan organisasi Mahasiswa mengambil jalur non-litigasi atau perjuangan politik sebagai upaya untuk mempertahankan hak atas pemukiman warga yang tinggal di Bulogading. Karena menurut warga, upaya litigasi (Hukum) yang dilakukan pasti akan mendapatkan jalan yang buntu, karena bagi warga, mereka tidak seperti pengusaha yang bisa menyogok penegak hukum di Pengadilan dan Badan Pertanahan lantaran mereka terbatas secara ekonomi.

B. Perjuangan Politik Miskin Kota Makassar

Perjuangan politik bagi miskin kota adalah upaya untuk bagaimana mereka mendapatkan keadilan yang setara dengan warga kota lainnya. Dari permasalahan dimana peliknya akses keadilan yang ada di kota bagi miskin kota itu sendiri. Perjuangan kaum miskin kota melalui Organisasi Rakyat (OR), yang sebagai wadah

saling menghubungkan antar warga miskin kota lainnya yang membutuhkan keadilan dan hak atas kota, karena perjuangan atas ruang menjadi titik temu dari berbagai tempat di Makassar yang hari ini memiliki permasalahan besar berupa ancaman penggusuran seperti yang dialami warga Bulogading dan Kampung Berua, yang hingga hari ini melebur ke dalam wadah OR yang bernama FORWA (Forum Warga) demi sebuah upaya membuka ruang bagi kaum miskin kota untuk mendapatkan tempat yang layak dan mendapatkan akses keadilan.

Dari hasil wawancara beberapa warga dan pengurus FORWA selaku *Organizer* kaum miskin kota mengatakan bahwa ruang menjadi hal yang mesti direbut dan dinikmati pula oleh miskin kota karena ruang bagi mereka atas dasar kedaulatan politik bagi manusia yang menempati sebuah wilayah sebagaimana dalam UUD 1945 Amandemen IV Pasal 27 ayat 2 yang menyatakan bahwa *tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan*.

Menurut FORWA, perjuangan miskin kota sangatlah strategis untuk menyampaikan dan mengkampanyekan masalah yang dihadapi rakyat hari ini, termasuk pula nasib mereka karena kota itu sendiri berada di tengah-tengah pusat kekuasaan (Politik Ekonomi dan Budaya). Aspirasi rakyat kecil dapat tersampaikan entah dalam bentuk kampanye isu, solidaritas, aksi demonstrasi, maupun okupasi terhadap bangunan instansi pemerintahan.

a. *Civil Society*

Inilah yang menjadi dasar bagi perjuangan politik kaum miskin kota. Perjuangan ini berupaya mewujudkan sebuah tatanan masyarakat yang mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi termasuk permasalahan kemiskinan, pengangguran, pemukiman kumuh, pendidikan, kesehatan, dan permasalahan hak atas kedaulatan tanah yang hari ini menjadi masalah pelik oleh pemerintah terhadap kaum miskin kota yang berada di kota Makassar.

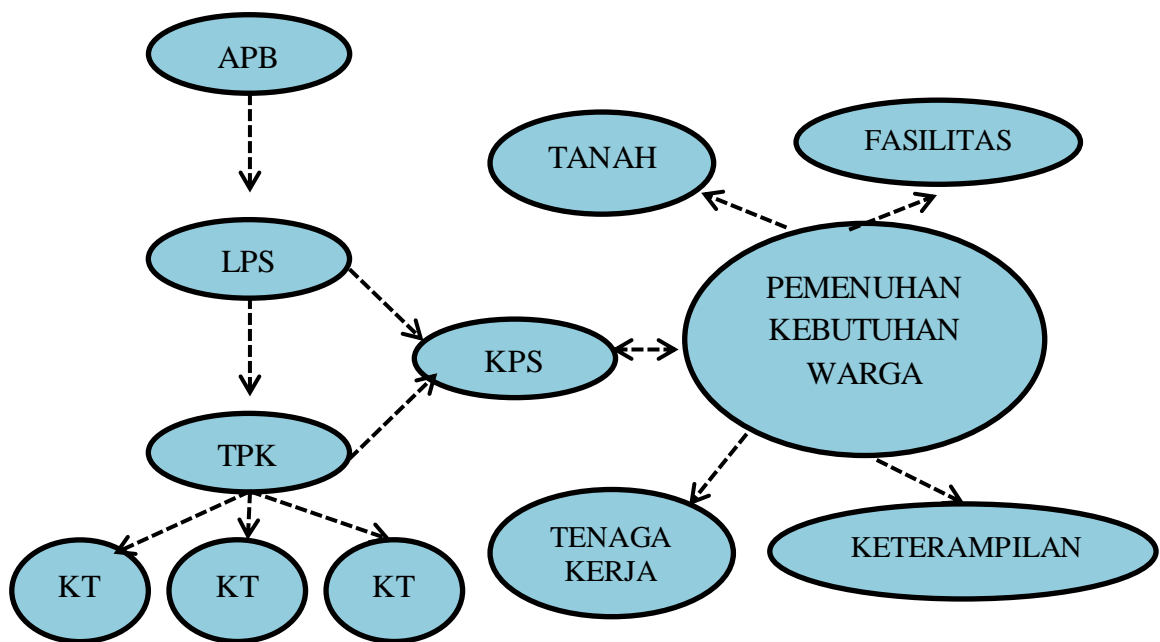
Melalui FORWA dengan perencanaannya, program yang bersinergi dengan visi-misi yang secara massif dan terorganisir. Upaya *Civil-Society* sebenarnya mirip dengan perjuangan pemberdayaan masyarakat menuju level yang lebih memadai, yang mampu mengakses dan secara mandiri memenuhi kebutuhannya, terutama akses terhadap keadilan dan hak atas kota. Gerakan ini sebenarnya, mirip dengan gerakan-gerakan ORMAS Islam seperti Muhammadiyah dimasa lalu yang dimana perjuangan melawan penindasan-penindasan sosial melalui program-program yang dilakukan untuk mendorong terjadinya perubahan. Dari visi *Social-Society*, perjuangan punya dasar cita-cita yang ingin mereka rebut dan dari misi, dapat menciptakan keadilan bagi kaum miskin kota agar mendapatkan ruang akan hak atas kota yang sama dengan warga kota pada umumnya.

b. Program Kerja

Program kerja FORWA selaku organisasi rakyat bukan hanya berupaya mengadvokasi kasus warga, tetapi juga berupaya memandirikan warga melalui

program-program pembinaan dengan melibatkan warga dalam pelatihan-pelatihan paralegal dan melibatkan warga dalam kepengurusan organisasi rakyat atau di dalam FORWA serta terlibat dalam perjuangan miskin kota di tempat lain di kota Makassar. Upaya secara ekonomi yang dilakukan warga untuk memenuhi kebutuhan tambahan mereka yaitu berupa pengadaan koperasi rakyat yang dijalankan oleh warga sendiri.

Upaya tersebut pun berupaya memandirikan warga untuk menciptakan sebuah sistem ekonomi mandiri berupa koperasi-koperasi rakyat yang dijalankan oleh warga, berupa tabungan bersama yang sewaktu-waktu dibutuhkan. sebagaimana program sebagai berikut.



Penjelasan Skema koperasi swadaya warga dokumen FORWA

APB : Anggaran Pendapatan dan Belanja

LPS : Lembaga Perekonomian Swadaya

TPK : Tabungan Pembangunan Komunitas

KT : Kelompok Tabungan

KPS : Koperasi

C. Pengorganisasian dan Pengorganisir Rakyat

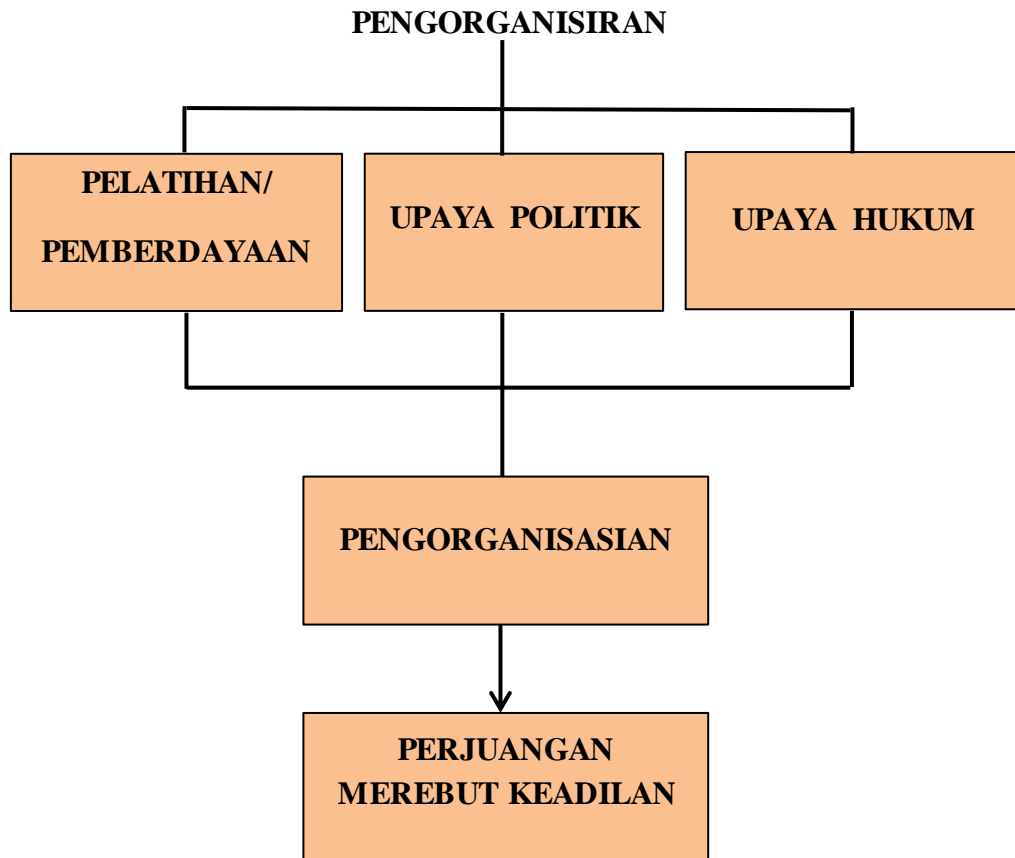
Pertama, pengorganisir adalah upaya untuk mengetahui dan memetakan sebuah kondisi wilayah yang mengalami permasalahan kemiskinan dan memiliki permasalahan yang cukup besar berupa ancaman penggusuran. Apalagi kita ketahui, bahwa jumlah yang mendominasi dalam sebuah masyarakat adalah masyarakat miskin. Sebagaimana skema di bawah ini:



Gambar 1.2 : Skema Piramida Masyarakat secara Ekonomi Politik

Apalagi Makassar yang *notabene*-nya adalah wilayah kota metropolitan yang tingkat kemiskinannya cukup besar, dimana permasalahan kaum miskin kota menjadi momok besar karena, yang mendominasi kota ini dan menghiasinya dari setiap sudut adalah pemukiman kumuh kaum miskin kota, seperti; Bulogading, kampung Berua, dan lainnya yang dimana monopoli kota pun hanya dinikmati oleh segelintir masyarakat golongan atas yang menikmati keadilan dan hak atas kota.

Kedua, pengorganisasian sebagai upaya untuk mendorong jauh kesadaran warga dari problem yang dihadapinya dalam kesehariannya untuk mendapatkan akses keadilan dan hak atas ruang kota, serta kepedulian yang tercipta atas solidaritas kepedulian antar sesama miskin kota yang mempunyai nasib serupa. Melalui kesadaran akan pentingnya persatuan untuk bersama-sama menciptakan sebuah tatanan masyarakat yang diinginkan melalui organisasi rakyat yang dikerjakan dan dijalankan secara bersama selaku upaya untuk mencapai visi-misi, agar terbentuknya *Social Society* yang demokratis.



Skema Pengorganisasian Dan Pemberdayaan Masyarakat Kaum Miskin Kota

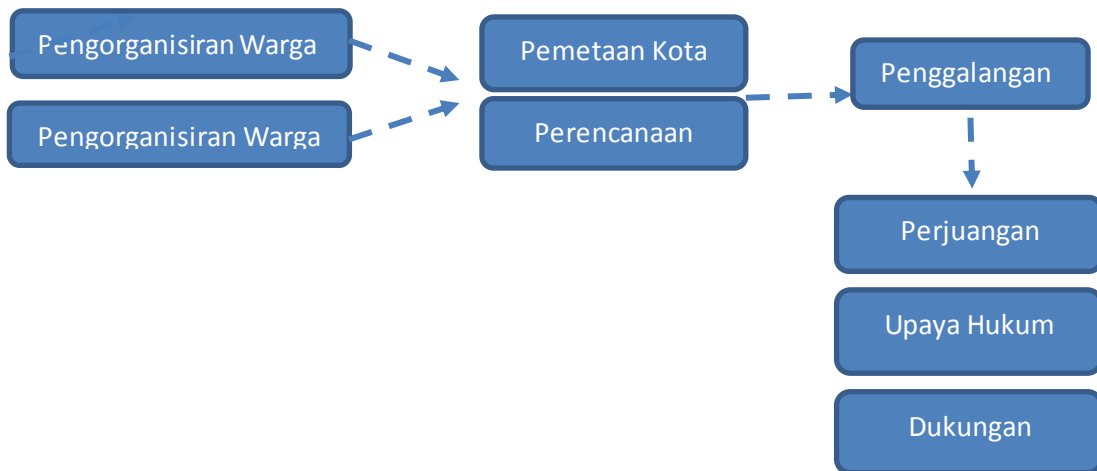
D. Capaian dan Faktor Pembatas

Rentang panjang perjuangan warga mempertahankan ruang hidupnya di tengah-tengah laju kota yang setiap saat melakukan perombakan guna mencapai ambisi besarnya yaitu pembangunan kota dunia seperti yang di gagas oleh Pemerintah Kota Makassar dengan programnya “Makassar Menuju Kota Dunia”. Dimana situasi tersebut ketika diperhadapkan dengan kondisi kota hari ini, itu tidak memungkinkan untuk diterapkannya program “Makassar Menuju Kota Dunia” dikarenakan struktur

ekonomi masyarakat Makassar masih di bawah rata-rata dan akses keadilan bagi masyarakat ekonomi menengah sampai bawah masih sangat terbatas untuk mencapai titik keadilan.

Hal inilah yang menjadi upaya politik kaum miskin kota memperjuangkan hidupnya secara ekonomi politik dengan sebuah program dan visi misi.

Gambar 1. Peta skema program perjuangan rakyat



Adapun capaian dari perjuangan kaum miskin kota terkhusus Bulogading dan Kampung Berua yaitu:

1. Pembangunan posko perjuangan bersama sebagai ruang musyawarah warga. Komunikasi masyarakat setempat lebih intens dari biasanya, guna mengomunikasikan permasalahan-permasalahan warga seperti tindak lanjut proses hukum perdata status lahan hidup warga yang dibasis oleh lembaga bantuan hukum Makassar yang dirumuskan dalam program dan kerja-kerja sosial lainnya.

2. Sebagai dukungan dari beberapa pihak dari luar yaitu instansi pemerintahan, mahasiswa, serikat tani, lembaga bantuan hukum, swasaya, serikat buruh, dan swadaya luar kota.
3. Pembangunan ekonomi alternatif dan pendidikan alternatif yang digunakan tetap ada dan program inilah yang menjadi semangat juang warga setempat, di tengah-tengah arus kota yang semakin meminggirkan kaum miskin kota.

Rentang yang panjang inilah yang menjadi tolak ukur harapan kaum miskin kota untuk bangkit di tengah-tengah pembangunan kota yang semakin meminggirkan mereka dengan ambisi pemerintah ke arah pembangunan kota tanpa perhatian bagi kaum miskin kota. Ketidakberpihakan Pemerintah terhadap kaum miskin kota yang kemudian membakar semangat mereka untuk bangkit dari dirampasnya lahan hidup, untuk kembali merebut hak-hak mereka yang diabaikan dan diingkari Pemerintah Kota Makassar.

Adapun faktor penghambat perjuangan kaum miskin kota diantaranya:

1. Partisipasi warga dalam menggalang solidaritas masyarakat kaum miskin kota masih sangat rendah. Disebabkan oleh sifat dasar warga yang cenderung oportunistis, individualis, dan sektoral. Sehingga partisipasi warga dalam menggalang solidaritas masih di bawah rata-rata.
2. Kurangnya partisipasi dan dukungan pemerintah terhadap warga. Hal itu terbukti atas keberpihakan pemerintah terhadap instansi terkait karena indikasi dari warga sendiri bahwa pemerintah terindikasi melakukan tindak korupsi dan keterlibatan

pemerintah dengan mafia, baik itu mafia hukum maupun mafia peradilan yang secara langsung menjadi lawan dari warga setempat.

3. Ekonomi yang masih lemah dimana ekonomi warga yang dibangun masih di bawah kontrol swakelola warga sendiri tanpa adanya donatur yang memberi secara sukarela atau sekedar membantu perekonomian mereka. Walaupun terkadang sesekali mendapat bantuan dari mahasiswa dan LSM.

Sejak diusungnya pembangunan kota, hal ini berlangsung dalam kehidupan kaum miskin kota dalam perjuangan politik kelas untuk mendapatkan keadilan bagi kehidupannya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang diperoleh bahwa perjuangan kaum miskin kota di Makassar. Hasil kajian sesuai dengan politik kemasyarakatan kota sudah ada capaian dan tahapan yang dilalui, walau masih banyak kekurangan dan hambatan yang harus ditempuh oleh warga sendiri yang mengalami polemik baik polemik bersama maupun personal. Dengan demikian hasil penelitian bisa disimpulkan sebagai berikut:

1. Perjuangan politik kaum miskin kota berupaya memperjuangkan hak mereka atas kota.
2. Adanya upaya solidaritas yang muncul dalam kepedulian terhadap kaum miskin kota yang menggalang nasib yang sama.
3. Tidak harmonisnya kaum miskin kota dengan Pemerintah Kota, yang dimana Pemerintah Kota hanya melihat keuntungan dari pembangunan ketimbang warganya yang masih berada digaris ekonomi di bawah rata-rata.
4. Adanya upaya dan harapan kaum miskin kota untuk mengubah kehidupannya lewat organisasi rakyat.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang dilakukan berikut saran yang peneliti berikan baik warga dan pemerintah ataupun instansi terkait dengan polemik yang dihadapi kaum miskin kota yaitu:

1. Pemerintah harus tahu bagaimana kondisi yang dihadapi warganya utamanya kaum miskin kota dan mengupayakan solusi alternatif sebagai solusi atas masalah yang dihadapi bukan justru menambah masalah yang dihadapi kaum miskin kota.
2. Perjuangan warga haruslah menjadi perjuangan semua lapisan masyarakat, baik warga yang mengalami polemik maupun yang secara tidak langsung mengalami polemik tersebut untuk merebut keadilan rakyat.
3. Perjuangan yang lebih besar dengan upaya membangun sebuah tatanan masyarakat yang baru, baik bagi kaum miskin kota, kaum buruh tani, dan buruh harian.
4. Perlu meningkatkan kerjasama atau kepedulian baik dari kalangan pemerintah maupun masyarakat sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Biehl, Janet. 2016. *Politik Ekologi Sosial Manisipalisme Libertarian*. Yogyakarta: Daun Malam.
- Elly, Setiadi M dan Kolip, Usman. 2011. *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial Teori Aplikasi dan Pemecahannya*. Jakarta: Kencana Pranada Media Group.
- Manludi syahrul. 2013. *Ibnu khaldun perintis kajian ilmu sosial modern*. Jakarta. Dian rakyat.
- Fromm, Erich. 2002. *Marx's concept of man konsep manusia menurut marx*. Yogyakarta : Pustaka pelajar.
- Mauludin syahrul. 2013. *Ibnu Khaldun perintis kajian sosial modern*, Jakarta; Dian Rakyat.
- Habibi, Muhtar. 2016. *Surplus Pekerja di Kapitalisme Pinggiran*. Serpong Tangerang : Marjin kiri.
- Harvey, David. 2016. *Imprealisme*. Yogyakarta : Resist book.
- Mulyanto, Dede. 2012. *Geneologi Kapitalisme*. Yogyakarta : Resist book.
- Sinaga, Marsen. 2017. *Pengorganisasian Rakyat dan Hal-Hal Yang Belum terselesaikan*. Yogyakarta: Insist press.
- Sahajuddin. 2012. *Potret Pedagang Kaki Lima. Makassar* :Sawerigading.

- Veby, Diani. 2012. *Langkah-Langkah Penyelesaian Masalah*.
<http://dianiveby.blogspot.co.id/2012/06/04-langkahpenyelesaian-masalah-menurut-hmtl> diakses tanggal 15 Juli 2017.
- Weber, Max. 2016. *Etika Protestan dan Spirit Kapitalisme, Sejarah Kemunculan dan Ramalan Tentang Perkembangan Kultur Industrial Kontemporer Secara Menyeluruh*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Wirandi, Gunawan. 2000. *Reforma Agraria Perjalanan Yang Belum Brakhir: KPA dan Pustaka Pelajar*. Yogyakarta : Insist Press.
- Zubir, Zaiyardan. 2002. *Radikalisme kaum pinggiran studi tentang ideologi, isu, srategi dan dampak gerakan*. Yogyakarta: Insist Press.
- Handayani, Lily Baiq. 2011. *Gerakan social baru*. Yogyakarta : Resist Book

L

A

M

P

I

R

A

N

1



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Sultan Alauddin No. 259 Makassar ☎ Fax (0411) 860 132 Makassar 90221 www.fkip-unismuh-info

PERSETUJUAN PEMBIMBING

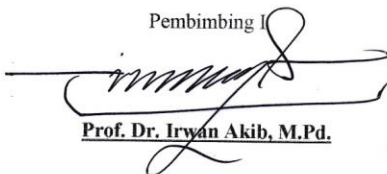
Mahasiswa yang bersangkutan:

Nama : Alim Amri Said
Stambuk : 105380208311
Jurusan : Pendidikan Sosiologi
Dengan Judul : Perjuangan Politik Kaum Miskin Kota (Kajian Sosiologi Politik Masyarakat Kota Makassar)

Setelah diperiksa dan diteliti ulang, maka proposal ini telah memenuhi persyaratan untuk diseminarkan pada Jurusan Pendidikan Sosiologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar.

Disetujui oleh:

Pembimbing I


Prof. Dr. Irwan Akib, M.Pd.

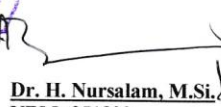
Pembimbing II


Sam'un Mukramin, S.Pd., M.Pd.

Mengetahui,

Ketua Jurusan Pendidikan Sosiologi




Dr. H. Nursalam, M.Si.
NBM: 951829



BAN-PT Badan Akreditasi Nasional



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Sultan Alauddin No. 259 Makassar ☎ Fax (0411) 860 132 Makassar 90221 www.fkip-unismuh-info

KARTU KONTROL BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Alim Amri Said
Stambuk : 105380208311
Jurusan : Pendidikan Sosiologi
Pembimbing : **Prof. Dr. Irwan Akib, M.Pd.**
Dengan Judul : Perjuangan Politik Kaum Miskin Kota (Kajian Sosiologi Politik Masyarakat Kota Makassar)

Konsultasi Pembimbing I

No	Hari/Tanggal	Uraian Perbaikan	Tanda Tangan
		OK	J

Catatan :

Mahasiswa hanya dapat mengikuti ujian Proposal jika sudah konsultasi ke Dosen Pembimbing minimal 3 kali



Mengetahui
Ketua Jurusan Pendidikan Sosiologi

Dr. H. Nursalam, M.Si.
NBM. 951 829



Badan Akreditasi Nasional



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Sultan Alauddin No. 259 Makassar ☎ Fax (0411) 860 132 Makassar 90221 www.fkip-unismuh-info

KARTU KONTROL BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Alim Amri Said
Stambuk : 105380208311
Jurusan : Pendidikan Sosiologi
Pembimbing : **Sam'un Mukramin, S.Pd., M.Pd.**
Dengan Judul : Perjuangan Politik Kaum Miskin Kota (Kajian Sosiologi Politik Masyarakat Kota Makassar)

Konsultasi Pembimbing II

No	Hari/Tanggal	Uraian Perbaikan	Tanda Tangan
1.	07/06/2017	<ul style="list-style-type: none">- Uraikan dilatar belakang apa yang mendorong peneliti- Rumusan Masalah di perbaiki- Kutipan di perhatikan cara penulisan dan di tulis di daftar pustaka- Perbaiki sistematika penulisan termasuk tanda baca.	
2.	18/07/2017	<ul style="list-style-type: none">- Perbaiki kutipan dalam penulisan kutipan paragraf termasuk teknik pengutipan paragraf- Revisi sistematika penulisan	
3.	27/07/2017	<ul style="list-style-type: none">- Cara penulisan daftar pustaka di perbaiki	

Catatan :

Mahasiswa hanya dapat mengikuti ujian Proposal jika sudah konsultasi ke Dosen Pembimbing minimal 3 kali



Mengetahui,
Ketua Jurusan Pendidikan Sosiologi

Dr. H. Nursalam, M.Si.
NBM. 951 829



Badan Akreditasi Nasional



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

BERITA ACARA

Pada hari ini Selasa Tanggal 15 Dzulhijjah 1438 H bertepatan tanggal 8 Agustus 2017 M bertempat di ruang minikel Pt.P kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, telah dilaksanakan seminar Proposal Skripsi yang berjudul :

Penguangan politik kaum mistik kota (studi kasus sosial politik koalysraton kota Makassar)

Dari-Mahasiswa :

Nama : AUM AMRI SAID
Stambuk/NIM : 1030700311
Jurusan : Sosio Logi
Moderator : SAMUUN MUBRA'IMIN S.Pd. M.Pd
Hasil Seminar :
Alamat/Telp : Wimbung / 081 245 949 966

Dengan penjelasan sebagai berikut :

4. Pahami Berita dengan cara tulis

Disetujui

Penanggung I : SAMUUN MUBRA'IMIN S.Pd M.Pd
Penanggung II : Dr. H. Abd Rahman Rahim SE M.M
Penanggung III : Dr. H. Pus Lengy Babu M.Si
Penanggung IV : Dr. Abd Aziz Muslimin M.Pd

Makassar 20.....



Ketua Jurusan
(Dr. H. Nursalam M.Si)



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS KEGURUAN dan ILMU PENDIDIKAN

Alamat Kantor : Jl Sultan Alauddin No. 259 ☎ (0411) 860 837 Fax (0411) 860 132 Makassar 90221/http://www.fkip-unismuh.info

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

KETERANGAN PERBAIKAN HASIL UJIAN PROPOSAL

Berdasarkan Hasil Ujian :

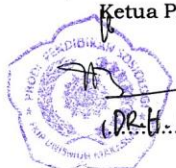
Nama : Alim Amri Sa'id
 Stambuk : 105.30.20.83.11
 Program Studi : Sosiologi
 Judul : Perjuangan politik kaum miskin kota (skripsi kajian sosial politik pemerintahan kota makassar)

Oleh tim penguji, harus dilakukan perbaikan-perbaikan. Perbaikan tersebut dilakukan dan disetujui oleh tim penguji sebagai berikut :

No	Tim Penguji	Disetujui Tanggal	Tanda Tangan
1	Sarkam Muli Amin, Spd, M.pd		
2	Dr. H. Abd Edhman Fahim, SE, MM	20 Agustus 2017	
3	Dra. Hj. Roslailiy Baboo, MSi		
4	Dra. Abul AZIZ Muslimin, M.Pd	21 Agt 2017	

Makassar , 1438 H
 2017 M

Ketua Prodi,



(DR. H. Nursalim, M.Si.....)



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN**

Nomor : 14184/S.01P/P2T/09/2017
Lampiran :
Perihal : Izin Penelitian

KepadaYth.
Walikota Makassar

di-
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 2045/Izn-05/C.4-VIII/IX/37/2017 tanggal 22 September 2017 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a : **ALIM AMRI SAID**
Nomor Pokok : 10538 2083 11
Program Studi : Pend. Sosiologi
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)
Alamat : Jl. Sultan Alauddin No. 259, Makassar

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

" PERJUANGAN POLITIK KAUM MISKIN KOTA (STUDI KAJIAN SOSIAL POLITIK KEMASYARAKATAN KOTA MAKASSAR) "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **26 September s/d 26 Oktober 2017**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada tanggal : 26 September 2017

**A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN**
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu



A. M. YAMIN, SE., MS.
Pangkat : Pembina Utama Madya
Nip : 19610513 199002 1 002

Tambahan Yth
1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar;
2. *Pertinggal*
SIMAP PTSP 26-09-2017



Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://p2tbkpmdu Sulselprov.go.id> Email : p2t_provsulsel@yahoo.com
Makassar 90222





PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Ahmad Yani No 2 Makassar 90111
Telp +62411 – 3615867 Fax +62411 – 3615867
Email : Kesbang@makassar.go.id Home page : <http://www.makassar.go.id>



Makassar, 29 September 2017

K e p a d a

Nomor : 070 / 4516 -II/BKBP/IX/2017
Sifat :
Perihal : Izin Penelitian

Yth. 1. CAMAT TAMALATE
KOTA MAKASSAR
2. CAMAT UJUNG PANDANG
KOTA MAKASSAR
Di -
MAKASSAR

Dengan Hormat,

Menunjuk Surat dari Kepala Dinas Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 14184/S.01P/P2T/09/2017, Tanggal 26 September 2017, Perihal tersebut di atas, maka bersama ini disampaikan kepada Bapak bahwa:

NAMA : ALI AMRI SAID
NIM/ Jurusan : 105 38208311 / Pend. Sosiologi
Pekerjaan : Mahasiswa (S1) Unismuh
Alamat : JL. Sultan Alauddin No 259, Makassar
Judul : " *PERJUANGAN POLITIK KAUM MISKIN KOTA (STUDI KAJIAN SOSIAL POLITIK KEMASYARAKATAN KOTA MAKASSAR)*"

Bermaksud mengadakan **Penelitian** pada Instansi / Wilayah Bapak, dalam rangka **Penyusunan Skripsi** sesuai dengan judul di atas, yang akan dilaksanakan mulai tanggal **29 September s/d 29 Oktober 2017**.

Sehubungan dengan hal tersebut, pada prinsipnya kami dapat **menyetujui dengan memberikan surat rekomendasi izin penelitian ini** dan harap diberikan bantuan dan fasilitas seperlunya.

Demikian disampaikan kepada Bapak untuk dimaklumi dan selanjutnya yang bersangkutan melaporkan hasilnya kepada Walikota Makassar Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

A.n.WALIKOTA MAKASSAR
KEPALA BADAN KESBANG DAN POLITIK
Ud. KABID HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA



Drs. IRIANSJAH R. PAWELLERI.M.A.P

Pangkat : Pembina
NIP : 19621110 198603 1 042

Tembusan :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prop. Sul – Sel. di Makassar;
2. Kepala Unit Pelaksana Teknis P2T Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Prop. Sul Sel di Makassar;
3. Ketua LP3M Unsimuh Makassar di Makassar
4. Mahasiswa yang bersangkutan;
5. Arsip



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
 KECAMATAN TAMALATE
 Jalan Danau Tanjung Bunga Utara No. 181 Makassar 90224
 Telp. +62411 - 879 249

Email : keciamatantamalate09@gmail.com Home page : http://kectamalate.com

Makassar, 12 Oktober 2017

Nomor : 400/xx/KT/X/2017
 Sifat :
 Lampiran :
 Perihal : **Rekomendasi Penelitian**

Kepada
 Yth. Lurah Pa'Baeng-baeng
 Di-
 Makassar

Berdasarkan Surat dari Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Nomor :070/4518-II/BKBP/IX/2017 Tanggal 29 September 2017, perihal tersebut di atas maka dengan ini disampaikan kepada saudara bahwa :

Nama : **ALI AMRI SAID**
 Nim/Jurusan : 10538208311 / Pend. Sosiologi
 Pekerjaan : Mahasiswa (SI) Unismuh
 Alamat : Jl. Sultan Alauddin No. 259, Makassar
 Judul : **"PERJUANGAN POLITIS KEMASYARAKATAN KOTA MAKASSAR"**
 (STUDI KAJIAN SOSIAL POLITIS)
 Pelaksanaan : 29 September 2017 s/d 29 Oktober 2017

Bermaksud mengadakan Pengambilan Data pada Wilayah Saudara dalam rangka Penyusunan Skripsi dan pada prinsipnya kami menyetujui, oleh sebab itu diharapkan Saudara memberikan bantuan dan fasilitas seperlunya.

Demikian disampaikan kepada Saudara untuk dilaksanakan dan selanjutnya yang bersangkutan melaporkan hasilnya kepada Camat Tamalate Kota Makassar.

An. Camat Tamalate
 K.a. Seksi Kesra & PMK

[Signature]
 Dewi Rosita Dj, S.STP
 Pangkat : Penata
 NIP. 19830128 200112 2 001

*Jepan yth :
 Bpk R.W.05/RT 05.
 Di Mohon bantuannya
 / membantu nama ISB diatas.
 dan peneliti dan dgn judul
 "Perjuangan politik kaum muslim"
 M. Mawaty*

M. MAWATY, S.P.
 NIP. 19680604119920329018
 Pangkat : Penata Tk. I (III) / 2
 1. Mahasiswa yang Bersangkutan
 2. Petinggi

L

A

M

P

I

R

A

N

2

Daftar informasi

Pedoman wawancara

Daftar pedoman

No	Nama	Jenis kelamin	Pekerjaan
1	U.M	Perempuan	Ketua RT
2	D.J	Laki-laki	Ketua RT
3	A.H	Laki-laki	Penasehat hukum YLBH
4	M.M	Laki-laki	Penasehat hukum YLBH
5	T.N	Laki-laki	Pengurus porwa Makassar
6	E.R	Laki-laki	Pengurus porwa Makassar
7	R.S	Laki-laki	Pengurus porwa
8	R.B	Laki-laki	Mahasiswa yang mendampingi kasus warga
9	M.I	Laki-laki	Wartawan
10	D.R	Laki-laki	Warga kampung borua
11	S.Y	Perempuan	Warga bulogading
12	K.N	Perempuan	Warga kampung korua

Pedoman Wawancara

Pertanyaan untuk warga

1. Assalamu alaikum siapa nama bapak/ibu....?
2. Bagaimana peranan pemerintah selaku yang berwenang mensejahterakan rakyat dan memberi keadilan kepada rakyat utamanya masyarakat yang berada jauh di bawah garis kemiskinan ?
3. Apa permasalahan bapak itu yang mendasar ?
4. Bagaimana upaya warga menangani permasalahannya ?
5. Mengapa warga membangun organisasi dan mempercayai perjuangan politik ?
6. Apa kendala dan capaian warga selama ini yang didapat selama perjuangan mempertahankan hak dan melawan penggusuran ?
7. Apa harapan besar bapak/ibu selaku warga kota, kepada pemerintah kota Makassar
8. Kenapa warga ikut terlibat dalam pembangunan jejaring perjuangan kaum miskin kota ?
9. Apa-apa saja yang sudah dilakukan warga dan dilalui ?

Pertanyaan kepada pendamping hukum

1. Ass. Siapa nama bapak
2. Upaya apa yang dilakukan bapak selaku penasehat hukum warga
3. Apa kendala bapak selama mengawal kasus warga
4. Pengalaman apa yang bapak dapat selama mengawal kasus warga
5. Apa harapan bapak selaku penasehat hukum pada warga dan pemerintah

Pertanyaan buat pengurus dari forwa

1. Apa kendala pembangunan perjuangan miskin kota Makassar ?
2. Apa capainya dari perjuangan miskin kota Makassar ?
3. Upaya forwa yang telah berhasil dilakukan dibasic basis apa ?
4. Apa harapan dari forwa !

L

A

M

P

I

R

A

N

3

Gotong Royong Forwa



Aksi Perjuangan Politik Forwa





Rapat Internal Forwa



RIWAYAT HIDUP



Alim Amri Said lahir di Makassar 30 Agustus 1993, anak pertama dari pasangan M.Said Daeng Tuppu dengan Hasiah daeng Mala

Penulis mulai menginjak Sekolah Dasar di SD Inpress tamattia dan tamat pada Tahun 2005 dan kemudian melanjutkan ke Mts

Muhammadiyah mandalle gowa, hingga selesai pada Tahun 2008, melanjutkan pendidikan ke SMA Negeri 1 Galesong selatan Takalar dan tamat pada Tahun 2011, dan pada Tahun 2011 penulis mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan pada Pendidikan Sosiologi Satu (S 1) Di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) UNISMUH Makassar.